

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT SULAWESI UTARA 2015



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT SULAWESI UTARA 2015



**INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT
SULAWESI UTARA**
WELFARE INDICATORS OF SULAWESI UTARA
2015

ISBN

Nomor Publikasi	71522.1609
Katalog BPS	4102004.71
Ukuran Buku	18 X 25 cm
Jumlah Halaman	68 halaman

Naskah

Ajiwasesa Harumeka, SST

Editor

Titien Kristiningsih, SST, SE, MSi

Gambar Kulit

Arif Handoyo, SST

Icon

Designed by Freepik

Diterbitkan oleh

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Program pemerintah pada hakekatnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Karena masyarakat adalah subjek sekaligus menjadi objek pembangunan. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Untuk melihat seberapa jauh pencapaian program pembangunan dalam wacana kesejahteraan rakyat, maka BPS Provinsi Sulawesi Utara sebagai penyedia data, menerbitkan publikasi berjudul **Indikator Kesejahteraan Rakyat Sulawesi Utara 2015**.

Publikasi ini merupakan publikasi tahunan BPS Provinsi Sulawesi Utara yang menyajikan data tentang tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat di Provinsi Sulawesi Utara antar waktu, dan melihat perbandingan antar kabupaten/kota. Data untuk analisis indikator kesejahteraan rakyat bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret Tahun 2015. Terdapat perbedaan referensi waktu antara publikasi ini dengan publikasi sebelumnya karena ada perubahan metodologi susenas.

Dengan terbitnya buku ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam mewujudkan publikasi ini, disampaikan terima kasih.

Manado, 1 Juli 2016
Kepala,

Moh. Edy Mahmud

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
1. KEPENDUDUKAN	1
1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin	1
1.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk	4
1.3 Angka Beban Ketergantungan	6
1.4 Wanita menurut Usia Perkawinan Pertama	10
1.5 Penggunaan Alat/Cara KB	12
2. KESEHATAN DAN GIZI	15
2.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk	15
2.2 Tingkat Imunitas dan Gizi Balita	16
2.3 Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan	19
3. PENDIDIKAN	25
3.1 Angka Melek Huruf (AMH)	26
3.2 Rata-rata Lama Sekolah	29
3.3 Tingkat Pendidikan	31
3.4 Tingkat Partisipasi Sekolah (APS, APK, dan APM)	32
4. KETENAGAKERJAAN	35
4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	35
4.2 Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan	37



4.3	Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan	39
4.4	Jumlah Jam Kerja	41
5.	TARAF DAN POLA KONSUMSI	43
5.1	Pengeluaran Rumah Tangga	43
5.2	Konsumsi Kalori dan Protein	46
6.	PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN	49
6.1	Kualitas Rumah Tinggal	49
6.2	Fasilitas Rumah Tinggal	52
6.3	Status Kepemilikan Rumah Tinggal	54
7.	KEMISKINAN	57
7.1	Perkembangan Kemiskinan	58
7.2	Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	59
8.	SOSIAL LAINNYA	63
8.1	Perjalanan Wisata	64
8.2	Akses pada Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	65
8.3	Kredit usaha	66
8.4	Tindak Kejahatan	68



DAFTAR TABEL

Halaman

KEPENDUDUKAN

1.1	Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Sulawesi Utara	3
1.2	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Sulawesi Utara Menurut Kabupaten/Kota, 2015	6
1.3	Wanita Usia 15-49 tahun Pengguna Alat/Cara KB (persen), 2014 - 2015	13

KESEHATAN DAN GIZI

2.1	Penduduk yang Berobat Jalan berdasarkan Lokasi Berobat dan Wilayah, 2015	22
-----	--	----

PENDIDIKAN

3.1	Angka Melek Huruf menurut Kabupaten/Kota, 2015	27
3.2	Rata-rata Lama Sekolah per Kabupaten/ Kota di Sulawesi Utara	30
3.3	Penduduk 15 tahun keatas per Jenis Kelamin Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan (persen), 2015	31
3.4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Usia Sekolah, 2015	33
3.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan, 2015	34
3.6	Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan, 2015	34

KETENAGAKERJAAN

4.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (persen), 2013 - 2015	36
4.2	Komposisi Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Usaha (persen), 2015	39
4.3	Penduduk yang Bekerja menurut Jam Kerja (Ribu), 2013 - 2015	41



TARAF DAN POLA KONSUMSI

- 5.1 Rata-rata Pengeluaran Perkapita menurut Jenis Pengeluaran, 2014-2015 44

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

- 6.1 Rumah tangga menurut Indikator Kualitas Perumahan (persen), 2014–2015 50
- 6.2 Rumah tangga menurut Indikator Fasilitas Perumahan (persen), 2015 53

KEMISKINAN

- 7.1 Perkembangan Kemiskinan menurut Indikator di Sulawesi Utara, 2014 - 2015 60

SOSIAL LAINNYA

- 8.1 Penduduk per Jenis Kelamin yang Bepergian untuk Wisata menurut Kabupaten/Kota (persen), 2015 64



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Komposisi Luas Kota dan Luas Kabupaten di Sulawesi Utara, 2015	5
1.2 Komposisi Penduduk Sulawesi Utara (persen), 2010-2015	7
1.3 Angka Beban Ketergantungan, 2010 – 2015	8
1.4 Angka Beban Ketergantungan per Kabupaten/Kota, 2015	9
1.5 Wanita yang Kawin sebelum Mencapai Usia 21 tahun menurut Kabupaten/Kota (persen), 2015	11
2.1 Rata-rata Lama Sakit per Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2015	16
2.2 Anak Usia kurang dari 2 tahun yang masih Diberi ASI (persen), 2015	17
2.3 Rata-rata Lama Pemberian ASI (Bulan), 2015	18
2.4 Balita yang Pernah Mendapatkan Imunisasi (persen), 2015	19
2.5 Komposisi Penolong Persalinan Bayi di Sulawesi Utara (persen), 2015	20
3.1 Harapan Lama Sekolah, 2010-2015	27
4.1 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan (persen), 2015	38
4.2 Komposisi Status Pekerjaan Penduduk yang Bekerja (persen), 2015	40
5.1 <i>Gini Ratio</i> menurut Kabupaten/Kota, 2015	46
5.2 Rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Sulawesi Utara, 2015	48



6.1	Rumahtangga yang Menempati Rumah Sendiri per Kabupaten/Kota, 2015	55
7.1	Persentase Penduduk Miskin, 2013 - 2015	58
8.1	Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Menguasai/Memiliki HP (persen), 2015	66
8.2	Rumah Tangga Penerima Kredit Usaha (persen), 2015	67



1. KEPENDUDUKAN



Masalah kependudukan meliputi jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal pembangunan bila kualitasnya baik, namun sebaliknya dapat menjadi beban pembangunan bila kualitasnya rendah. Kualitas penduduk dapat ditingkatkan dengan peningkatan kebutuhan pangan, sandang, papan, dan pendidikan, kesehatan yang layak seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.

Seperti diketahui bersama bahwa hampir semua rencana pembangunan perlu ditunjang dengan data jumlah penduduk, persebaran dan susunannya menurut kelompok umur penduduk yang relevan dengan rencana tersebut. Oleh sebab itu untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional, dalam menangani permasalahan penduduk pemerintah tidak saja mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk tapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Disamping itu program perencanaan pembangunan sosial di segala bidang harus mendapat prioritas utama yang berguna untuk peningkatan kesejahteraan penduduk.

1.1. Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin

Jumlah penduduk berkaitan erat dengan laju pertumbuhan penduduk. Semakin tinggi rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun, otomatis akan meningkatkan jumlah penduduk secara pesat. Tingkat pertumbuhan yang tinggi pada daerah yang belum maju dapat menimbulkan permasalahan. Pertumbuhan penduduk tinggi yang disumbangkan oleh penambahan jumlah penduduk usia muda yang belum produktif menjadi beban perekonomian



secara makro dan menjadi beban rumahtangga secara mikro. Sedangkan pertumbuhan penduduk tinggi yang disumbangkan oleh penambahan jumlah penduduk usia muda yang produktif biasanya karena faktor banyaknya migrasi pencari kerja yang masuk juga tentu akan menimbulkan masalah sosial baru di suatu daerah.

Saat ini penduduk Sulawesi Utara menempati peringkat 4 dengan jumlah penduduk terbanyak di Pulau Sulawesi. Berdasarkan data proyeksi penduduk tahun 2010 – 2035, jumlah penduduk Sulawesi Utara sebanyak 2,41 juta jiwa. Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Pulau Sulawesi adalah Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk sebanyak 8,52 juta jiwa. Jumlah penduduk Sulawesi Utara mengalami kenaikan sebanyak 25,5 ribu jiwa dibandingkan dengan tahun 2014. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2010, jumlah penduduk Sulawesi Utara meningkat sebanyak 134,43 ribu jiwa, sekitar 5,9 %.

Sama halnya dengan provinsi lain, penduduk Sulawesi Utara banyak yang merapat ke wilayah kota. Pesona wilayah kota tidak dapat dikalahkan oleh wilayah kabupaten. Kota Manado menempati urutan pertama dengan jumlah penduduk paling banyak di Sulawesi Utara, yaitu sebanyak 425,63 ribu jiwa. Sedangkan yang paling sedikit adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yaitu 62,22 ribu jiwa.

Semenjak tahun 2010 hingga 2015, secara absolut, jumlah penduduk terus bertambah namun laju pertumbuhannya relatif mengalami penurunan. Laju pertumbuhan penduduk Sulawesi Utara sudah dibawah 2 persen, tergolong cukup kecil dibandingkan daerah lain atau rata-rata nasional. Penurunan laju pertumbuhan penduduk mengindikasikan keberhasilan program Keluarga Berencana dimana program ini ditujukan untuk menekan angka kelahiran, menciptakan norma keluarga kecil sehingga terbuka peluang bagi suatu keluarga untuk meningkatkan kualitas keluarganya.



Tabel 1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Sulawesi Utara

Tahun	Jumlah Penduduk (juta)	Laju pertumbuhan
(1)	(2)	(3)
2010	2,28	
		1,24
2011	2,31	
		1,20
2012	2,33	
		1,15
2013	2,36	
		1,11
2014	2,39	
		1,07
2015	2,41	

Sumber : Proyeksi Penduduk

Dengan jumlah penduduk yang relatif besar, permasalahan kependudukan di Sulawesi Utara perlu mendapat perhatian yang serius. Oleh karena itu, upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk disertai dengan peningkatan kesejahteraan penduduk harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan bersinergi dengan program-program pembangunan lainnya yang sedang dan akan dilaksanakan.

Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki laju pertumbuhan penduduk yang paling kecil diantara Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara. Laju pertumbuhan Sangihe adalah 0,37 persen, kurang dari separuh angka provinsi. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk yang paling tinggi berada di Kota Kotamobagu, sebesar 2,06 persen, hampir 2 kali lipat laju pertumbuhan penduduk Sulawesi Utara. Kota Manado yang merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Utara memiliki laju pertumbuhan penduduk yang cukup kecil, yaitu sebesar 0,56 persen.

Berdasarkan laju pertumbuhan di atas, ada *range* sebesar 1,68 persen. Hal itu mengindikasikan bahwa laju pertumbuhan penduduk kabupaten/kota di Sulawesi Utara tidaklah homogen. Dengan adanya disparitas tersebut, dimungkinkan adanya disparitas kebijakan kependudukan di Sulawesi Utara.



Laju pertumbuhan penduduk yang besar tidak serta-merta menjadikan jumlah penduduk yang besar pula. Sebagai contoh, laju pertumbuhan Kota Manado terbilang cukup kecil jika dibandingkan dengan Kota Kotamobagu. Tetapi, jika dilihat angka absolutnya, Kota Manado bertambah 2,38 ribu jiwa dan Kota Kotamobagu bertambah 2,41 ribu jiwa. Secara absolut hampir sama. Hal ini tidak terlepas dari jumlah penduduk di Kota Manado yang memang sudah besar.

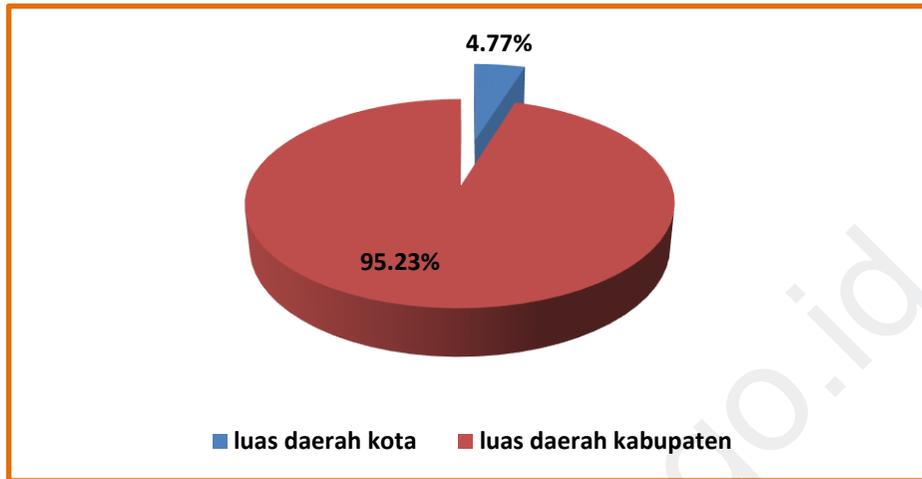
Bila dilihat komposisi penduduk menurut jenis kelamin, di Sulawesi Utara *sex ratio* dicatat sebesar 104,19. Artinya dari 100 penduduk perempuan terdapat 104-105 penduduk laki-laki. Dapat juga dikatakan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Kabupaten dengan *sex ratio* tertinggi adalah Bolaang Mongondow Timur, yaitu 109,32. Ada yang unik jika melihat *sex ratio* menurut Kabupaten/Kota. Terlihat Kabupaten Kepl. Siau Tagulandang Biaro adalah satu-satunya wilayah di Sulawesi Utara yang *sex ratio*-nya di bawah 100. Hal itu menandakan bahwa di Kepl. Siau Tagulandang Biaro penduduk perempuannya lebih banyak dibandingkan laki-laki.

1.2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Salah satu persolan yang dihadapi terkait penduduk adalah ketimpangan distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah. Di sisi lain, wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan dengan persoalan meningkatnya jumlah pengangguran karena tidak memadainya jumlah lapangan pekerjaan, permasalahan kebutuhan lahan untuk permukiman, serta tidak memadainya akses ke fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta masalah sosial lainnya.



Gambar 1.1. Komposisi Luas Kota dan Luas Kabupaten di Sulawesi Utara, 2015



Persebaran penduduk antara kabupaten dan kota tampak masih timpang, sehingga kepadatannya masih belum merata. Kepadatan penduduk biasanya terpusat di daerah perkotaan yang umumnya memiliki segala fasilitas yang dibutuhkan oleh penduduk sehingga mengundang penduduk wilayah kabupaten untuk bekerja atau

Kepadatan penduduk di Sulawesi Utara 165,85. Artinya terdapat 165 sampai 166 jiwa di setiap Km^2 . Daerah Kota di Sulawesi Utara menempati 4 teratas Kabupaten/Kota yang penduduknya terpadat. Daerah yang terpadat penduduknya adalah Kota Manado, dimana setiap Km^2 dihuni sekitar 2,55 ribu jiwa. Terpadat kedua adalah Kota Kotamobagu, yaitu setiap Km^2 dihuni sekitar 2,44 ribu jiwa. Sementara daerah yang paling jarang penduduknya adalah Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Utara, dimana di kedua kabupaten tersebut setiap Km^2 wilayahnya dihuni kurang dari 40 orang.

Tabel 1.2 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Sulawesi Utara Menurut Kabupaten/Kota, 2015

Kode	Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk per Km ²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Bolaang Mongondow	3.021,60	233.189	77,17
02	Minahasa	1.188,69	329.003	276,78
03	Kep. Sangihe	597,13	129.584	217,01
04	Kep. Talaud	1.014,74	88.803	87,51
05	Minahasa Selatan	1.478,47	204.983	138,65
06	Minahasa Utara	985,24	198.084	201,05
07	Bolaang Mongondow Utara	1.935,53	76.331	39,44
08	Kep. Siau Tagulandang Biaro	218,18	65.582	300,59
09	Minahasa Tenggara	709,28	104.536	147,38
10	Bolaang Mongondow Selatan	1.798,29	62.222	34,60
11	Bolaaang Mongondow Timur	904,16	68.692	75,97
71	Manado	166,87	425.634	2.550,69
72	Bitung	330,17	205.675	622,94
73	Tomohon	147,11	100.373	682,30
74	Kotamobagu	48,91	119.427	2.441,77
Sulawesi Utara		14.544,37	2.412.118	165,85

Sumber: Sulawesi Utara dalam Angka 2014

1.3. Angka Beban Ketergantungan

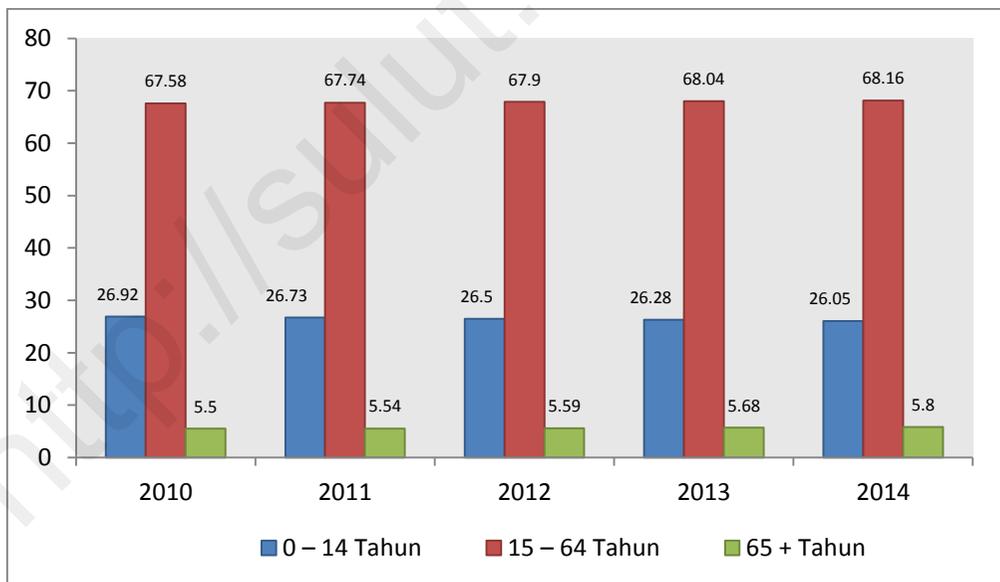
Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus di tanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum/tidak produktif lagi. Sebaliknya, persentase angka beban ketergantungan semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban



yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum/tidak produktif.

Gambar 1.3 menunjukkan komposisi penduduk Sulawesi Utara menurut tiga kelompok umur yakni kelompok umur produktif (15-64 tahun), kelompok umur belum produktif (0-14 tahun) dan tidak produktif (65 tahun ke atas). Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2015, Sulawesi Utara memiliki penduduk usia muda sekitar 25,81 persen, penduduk usia produktif 68,23 persen, dan penduduk usia lanjut 5,95 persen. Selama periode 2010-2015 telah terjadi peningkatan komposisi penduduk usia lanjut, dan dikenal dengan istilah proses penuaan (*aging process*) atau proses transisi umur dari penduduk muda ke penduduk tua, dan selama periode 2010-2015 terjadi penurunan jumlah penduduk usia muda serta penambahan proporsi penduduk usia produktif.

Gambar 1.2 Komposisi Penduduk Sulawesi Utara (persen), 2010-2015



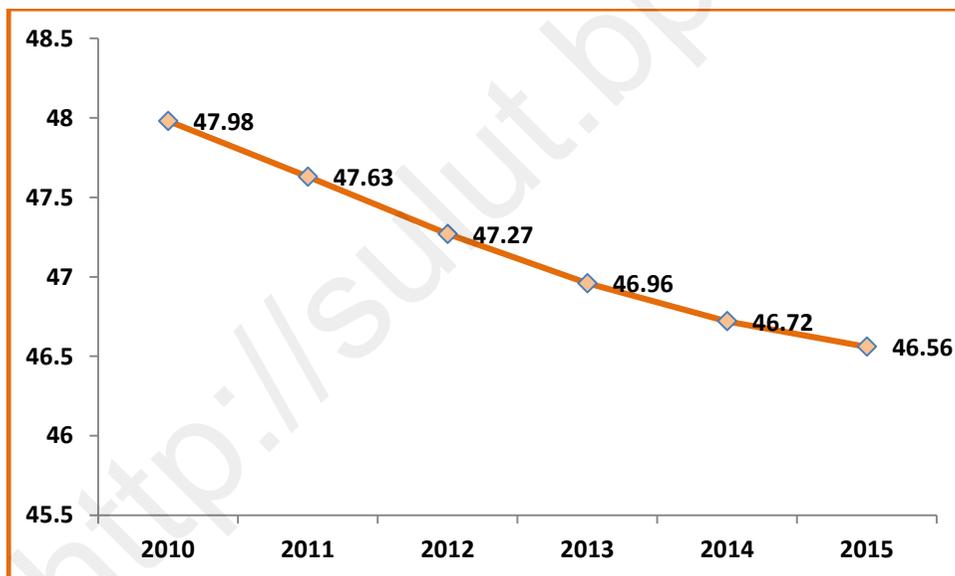
Sumber : Proyeksi Penduduk

Seperti yang disinggung sebelumnya bahwa dampak keberhasilan pembangunan kependudukan dapat dilihat dari angka beban ketergantungan



yang semakin mengecil. Pada tahun 2015 angka beban ketergantungan sebesar 46,56, berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung sekitar 46 sampai 47 penduduk usia tidak produktif, menurun jika dibandingkan tahun 2014. Hal ini dapat menjadi sinyal yang baik untuk pemerintah setempat memaksimalkan penduduk usia kerja. Bila proporsi penduduk usia tidak produktif semakin rendah (kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur 65 tahun atau lebih) maka angka beban ketergantungan akan semakin rendah. Semakin rendah angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya dan keturunannya dengan adanya investasi *human capital* maupun *saving*.

Gambar 1.3. Angka Beban Ketergantungan, 2010-2015



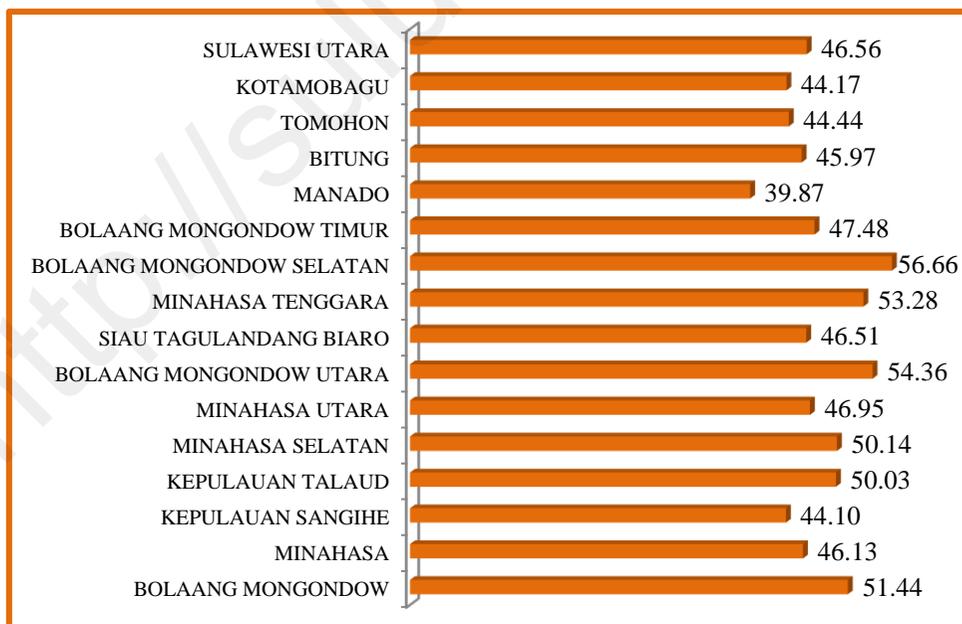
Sumber : Susenas

Tren angka beban ketergantungan 2010-2015 Sulawesi Utara terlihat ke arah penurunan dari 47,98 di tahun 2010 menjadi 46,56 di tahun 2015. Angka beban ketergantungan di bawah 50 merupakan indikasi bahwa suatu daerah masih berada pada periode jendela peluang (*windows of opportunity*).



Pada periode pendek tersebut diperoleh adanya bonus demografi yakni keuntungan ekonomis akibat adanya peningkatan proporsi penduduk usia produktif sehingga setiap 100 penduduk usia produktif hanya menanggung 50 penduduk usia tidak produktif atau perbandingannya hanya setengahnya. Ilustrasinya, dalam suatu rumah tangga terdapat 2 anggota rumah tangga usia produktif (misalnya ayah dan ibu) dan satu anggota rumah tangga yang tidak produktif, anak dibawah 15 tahun misalnya. Bayangkan jika terdapat kesempatan kerja yang juga cukup untuk menampung mereka, maka akan terjadi kelebihan kemampuan memenuhi kebutuhannya sehingga ada kemampuan bagi rumah tangga untuk melakukan *saving* atau melakukan investasi *human capital* yang lebih tinggi baik bagi kedua orang tua pada ilustrasi tadi ataupun bagi anaknya. Investasi *human capital* misalnya dengan menyekolahkan pada jenjang yang lebih tinggi, ataupun meningkatkan kemampuan tambahan misalnya melalui kursus dan lain-lain.

Gambar 1.4. Angka Beban Ketergantungan per Kabupaten/Kota, 2015



Sumber: Susenas 2015



Bila diamati berdasarkan kabupaten/kota, tampak 6 kabupaten yang angka beban ketergantungannya berada di atas 50. Kabupaten tersebut adalah Bolaang Mongondow (51,44), Kepulauan Talaud (50,03), Minahasa Selatan (50,14), Bolaang Mongondow Utara (54,36), Minahasa Tenggara (53,28), dan Bolaang Mongondow Selatan (56,66). Angka beban ketergantungan tertinggi di Sulawesi Utara berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sedangkan yang terendah adalah Kota Manado, yaitu 39,87.

1.4. Wanita menurut Usia Perkawinan Pertama

Laju pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh tiga faktor demografi, yaitu tingkat kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan (migrasi). Perpindahan atau migrasi dibagi menjadi migrasi masuk dan migrasi keluar. Tingkat fertilitas merupakan faktor demografi yang menentukan penurunan tingkat pertumbuhan penduduk. Program KB dan penundaan usia perkawinan pada wanita merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat fertilitas, karena memperpendek masa reproduksi mereka.

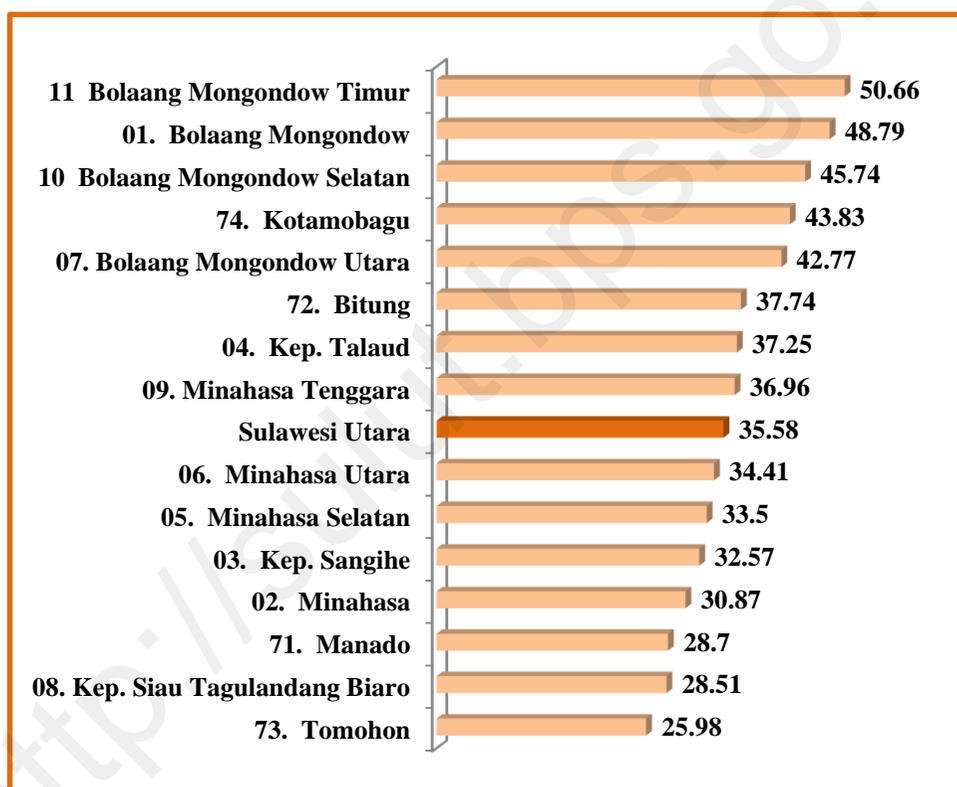
Usia perkawinan pertama seorang wanita berpengaruh terhadap resiko melahirkan. Semakin muda usia perkawinan pertama, semakin besar resiko yang dihadapi selama masa kehamilan/melahirkan, baik keselamatan ibu maupun anak, karena belum matangnya rahim wanita muda untuk proses berkembangnya janin atau karena belum siapnya mental menghadapi masa kehamilan/kelahiran. Menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), usia pernikahan pertama bagi seseorang idealnya adalah 21-25 tahun.

Hasil Susenas menunjukkan terdapat sekitar 35,5 persen wanita umur 10 tahun ke atas yang menikah pada usia di bawah 21 tahun di Sulawesi Utara tahun 2015. Perkawinan di bawah 21 tahun secara kesehatan reproduksi bisa dikatakan masih terlalu muda, secara mental sosial belum siap dan secara ekonomi juga biasanya belum mapan. Semakin muda usia



kawin pertama yang dilakukan seseorang, maka akan semakin lama pula masa reproduksinya. Hal ini berpengaruh pada tingkat fertilitas wanita dan penduduk secara umumnya. Semakin lama masa reproduksi wanita, maka kemungkinan wanita tersebut melahirkan banyak anak akan semakin besar. Dalam persoalan makro, hal ini akan menyebabkan meningkatnya tingkat pertumbuhan penduduk suatu daerah

Gambar 1.5. Wanita yang Kawin sebelum Mencapai Usia 21 tahun menurut Kabupaten/Kota (persen), 2015



Sumber: Susenas

Pada tahun 2015, hampir 51 persen wanita berumur 10 tahun ke atas di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengaku menikah sebelum mencapai usia 21 tahun. Angka itu menunjukkan persentase paling tinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lain yang ada di Sulawesi Utara.

Jika dilihat lebih detail ke kelompok umur kurang dari 21 tahun, masih ada sekitar 6 persen wanita di Sulawesi Utara yang menikah atau kawin pada umur 16 tahun ke bawah. Sementara itu, terdapat 10 diantara 100 wanita di Bolaang Mongondow menikah di usia 16 tahun atau sebelumnya. Dibanding kabupaten/kota lainnya, jumlah ini merupakan yang terbanyak. Cukup kontras bila dibandingkan dengan kondisi di Kota Tomohon, hanya 2 diantara 100 wanita saja yang menikah di rentang usia tersebut.

1.5. Penggunaan Alat/Cara KB

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak, dan kematian ibu. Program KB dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi yang berbagai jenis macamnya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan instansi pemerintah yang menangani program KB ini. BKKBN mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat, terutama untuk kepesertaan KB dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), seperti IUD dan Implan. Dengan cakupan KB yang semakin meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk lebih dapat dikendalikan lagi.

Berdasarkan hasil Susenas, persentase wanita yang berumur 15-49 tahun yang berstatus pernah kawin dan sedang menggunakan alat/cara KB pada tahun 2015 hampir mencapai 67 persen. Sedikit menurun jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai 68 persen, namun tidak signifikan.

Berdasarkan masa kerjanya, kontrasepsi dibedakan menjadi 2, yaitu sementara dan permanen. Seseorang mempunyai pilihan untuk menggunakan jenis alat/cara KB tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor kemanan, frekuensi pemakaian dan efek samping, keterjangkauan harga, cara penggunaan yang dianggap paling praktis, efektif, minim resiko



kegagalan dan resiko efek samping terhadap kesehatan pemakai dan memberikan kenyamanan bagi penggunanya.

Tabel 1.3 Wanita Usia 15-49 tahun Pengguna Alat/Cara KB (persen), 2014 - 2015

Alat/Cara Kontrasepsi	2014	2015
(1)	(2)	(3)
MOW/Tubektomi	2,36	2,21
MOP/Vasektomi	0,35	0,20
AKDR/IUD/Spiral	7,03	5,86
Suntikan	45,22	47,12
Implan/Susuk	15,42	16,69
Pil	27,22	26,46
Kondom/Karet	0,37	0,27
Intravag/Kondom Wanita	2,01	0,07
Cara Tradisional	0,02	1,13
% Wanita yang sedang menggunakan alat/cara KB	68,29	66,67

Sumber : Susenas

Melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Badan Pusat Statistik memotret bahwa di tahun 2015 suntikan dan pil merupakan dua alat kontrasepsi yang paling diminati oleh wanita umur 15-49 tahun yang pernah kawin. Kondisi ini masih sama dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2015, empat puluh tujuh persen dari mereka adalah pengguna alat KB suntik, sementara 26 persen adalah pemakai pil KB. Di sisi lain, masih terdapat 1 dari 100 wanita di rentang usia tersebut yang masih menggunakan KB cara tradisional.



<http://sulut.bps.go.id>



2. KESEHATAN DAN GIZI

Salah satu aspek penting kesejahteraan adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Salah satu aspek penting yang turut mempengaruhi kualitas fisik penduduk adalah status kesehatan antara lain diukur melalui angka kesakitan dan status gizi. Sementara untuk melihat gambaran tentang kemajuan upaya peningkatan dan status kesehatan masyarakat dapat dilihat dari penolong persalinan bayi, ketersediaan sarana kesehatan dan jenis pengobatan yang dilakukan. Oleh karena itu usaha untuk meningkatkan dan memelihara mutu pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat perlu mendapat perhatian utama.

2.1. Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

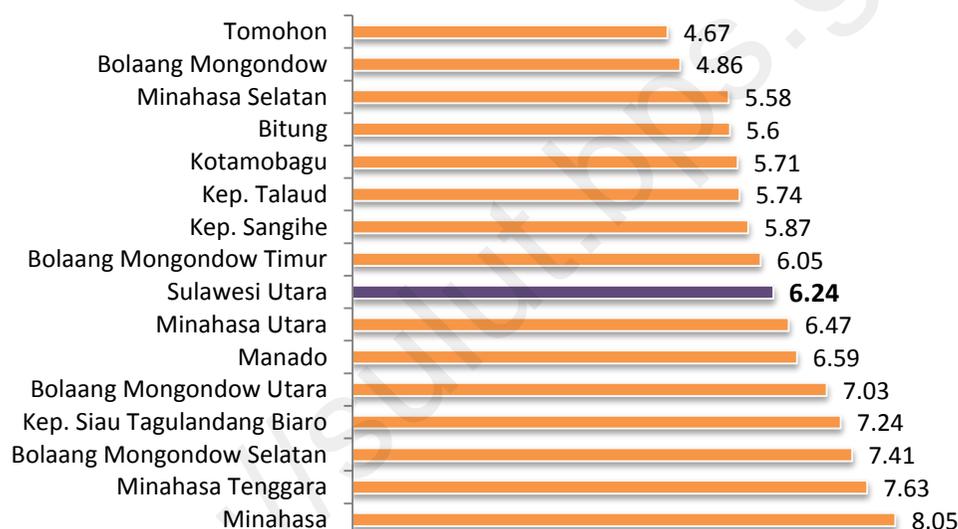
Salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan penduduk adalah morbiditas atau angka kesakitan penduduk dan rata-rata lama sakit atau lamanya terganggu aktifitas sehari-hari. Semakin kecil angka morbiditas dan rata-rata lama sakit berarti semakin baik penanganan keluhan kesehatan di suatu daerah. Merujuk pada konsep Badan Pusat Statistik, morbiditas menunjukkan adanya keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya kegiatan sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun aktivitas lainnya.

Pada tahun 2015, angka kesakitan (morbiditas) di Sulawesi Utara mencapai 17,5 persen. Hal ini berarti sekitar 17 hingga 18 dari 100 orang mengalami keluhan kesehatan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Kabupaten Minahasa Selatan merupakan wilayah yang mempunyai angka

kesakitan tertinggi di Sulawesi Utara pada tahun 2015, yaitu hampir mencapai 27 persen. Tingkat morbiditas terendah ada di Kota Manado dan Kota Kotamobagu, sebesar 12,47 persen.

Rata-rata lamanya seseorang terganggu karena sakitnya mengalami kenaikan dari tahun 2014 ke tahun 2015, yaitu dari 5,93 hari menjadi 6,24 hari. Bila dilihat per kabupaten/kota, Kota Tomohon memiliki rata-rata lama sakit terpendek yaitu 4,67 hari. Kabupaten Minahasa memiliki rata-rata lama sakit terpanjang yaitu 8,05.

Gambar 2.1 Rata-rata Lama Sakit per Kabupaten/ Kota di Sulawesi Utara, 2015



Sumber: Susenas 2015

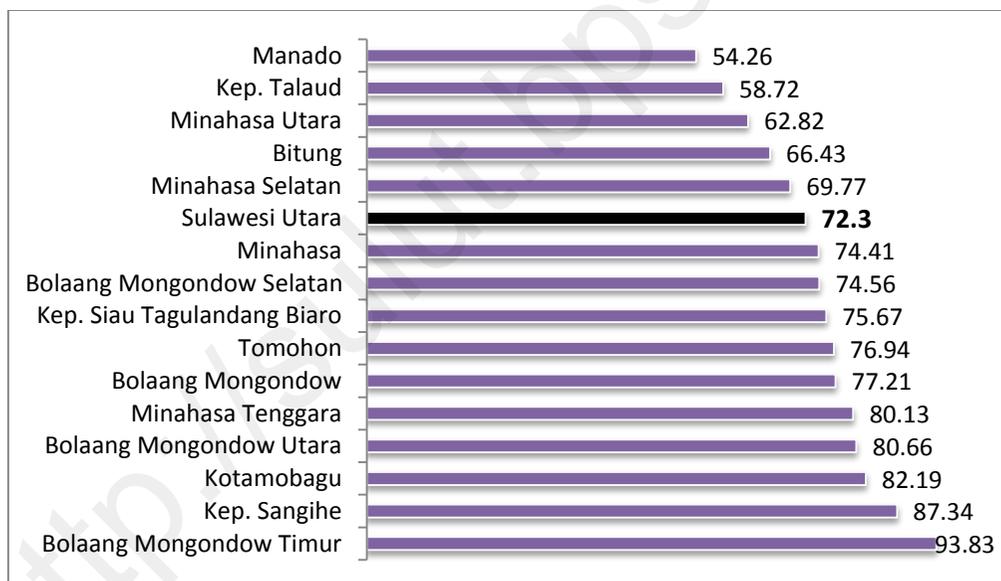
2.2. Tingkat Imunitas dan Gizi Balita

Ibu yang sedang mengandung harus memperhatikan asupan yang dimakannya dan juga harus melakukan imunisasi, karena hal tersebut merupakan gizi dan imunisasi awal seorang anak dimulai. Setelah sang anak lahir, Air Susu Ibu (ASI) dianjurkan supaya diberikan hingga anak berusia 2 tahun. ASI merupakan makanan pertama bayi yang memiliki peranan penting dalam proses tumbuh kembang anak. Semakin lama bayi mendapatkan ASI,



kekebalan/proteksi tubuh bayi akan lebih kuat. Pemerintah mencanangkan pemberian ASI eksklusif untuk anak hingga 6 bulan, setelah itu anak diberikan makanan pendamping ASI dan terus diberi ASI hingga usia 2 tahun. Di tahun 2015, ada sekitar 72 persen anak usia kurang dari 2 tahun di Sulawesi Utara yang masih diberi ASI oleh ibunya. Hal ini berarti ada sekitar 28 persen anak yang sudah putus ASI sebelum mencapai usia 2 tahun. Bila dilihat menurut Kabupaten/Kota, tampak bahwa persentase anak yang putus ASI paling tinggi berada di Kota Manado, sekitar 46 persen. Wilayah kedua tertinggi anak yang putus ASI sebelum mencapai usia 2 tahun adalah di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Gambar 2.2 Anak Usia kurang dari 2 Tahun yang masih Diberi ASI (persen), 2015

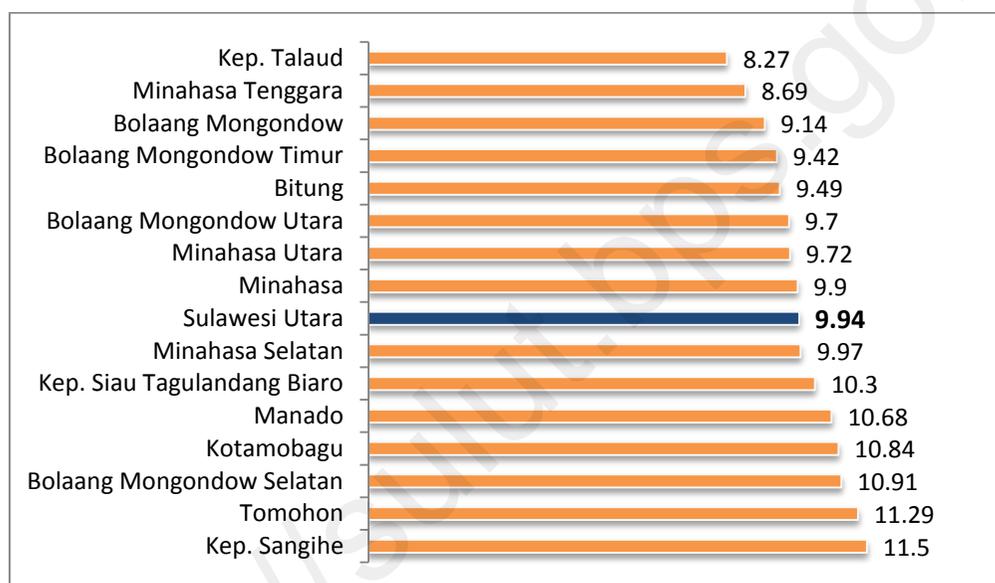


Sumber: Susenas 2015

Penyuluhan atau Sosialisasi tentang pentingnya pemberian ASI hingga anak berusia 2 tahun dapat terus dilakukan oleh pemerintah daerah. Kesadaran ibu untuk memberikan ASI juga sangat diperlukan demi generasi yang tahan terhadap penyakit kedepannya. Tentu saja dukungan seorang ayah juga tak kalah pentingnya untuk meningkatkan persentase anak yang

mengonsumsi ASI hingga usia 2 tahun. Gambar 2.2 menunjukkan bahwa di wilayah Sulawesi Utara rata-rata seorang anak disusui oleh ibunya sekitar 10 bulan. Dipandang dari sisi lainnya, diasumsikan konsep pemberian ASI 6 bulan pertama sudah terlampaui. Di seluruh kabupaten/kota pun kondisinya serupa, bahkan di Kep. Sangihe dan Tomohon mencapai 11 hingga 12 bulan. Sisi kurangnya, rata-rata lama menyusui masih jauh dari standar maksimal, yaitu 24 bulan.

Gambar 2.3 Rata-rata Lama Pemberian ASI (Bulan), 2015

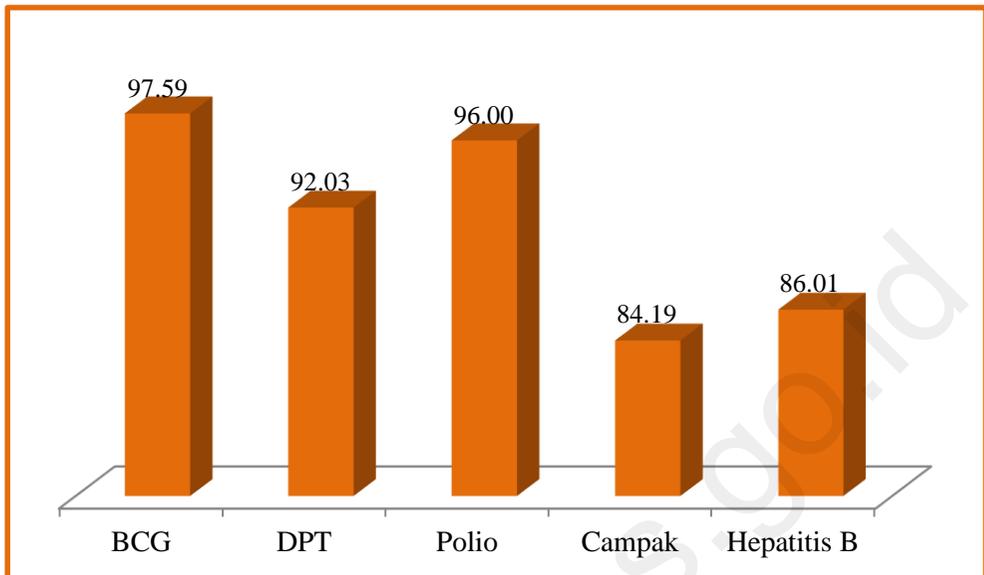


Sumber: Susenas 2015

Selain ASI, imunisasi sangat diperlukan bagi perkembangan dan peningkatan kekebalan daya tahan tubuh balita agar sistem pertahanan tubuhnya kuat terhadap suatu penyakit. Kementerian kesehatan menganjurkan agar semua anak-anak dapat memperoleh imunisasi secara lengkap. Anak yang memperoleh imunisasi dasar lengkap akan terlindungi dari berbagai macam penyakit berbahaya dan akan mencegah penularan kepada orang disekitarnya. Jenis imunisasi yang wajib diberikan pada balita adalah BCG, DPT, Polio, Campak/Morbili, dan Hepatitis B.



Gambar 2.4. Balita yang Pernah Mendapatkan Imunisasi (persen), 2015



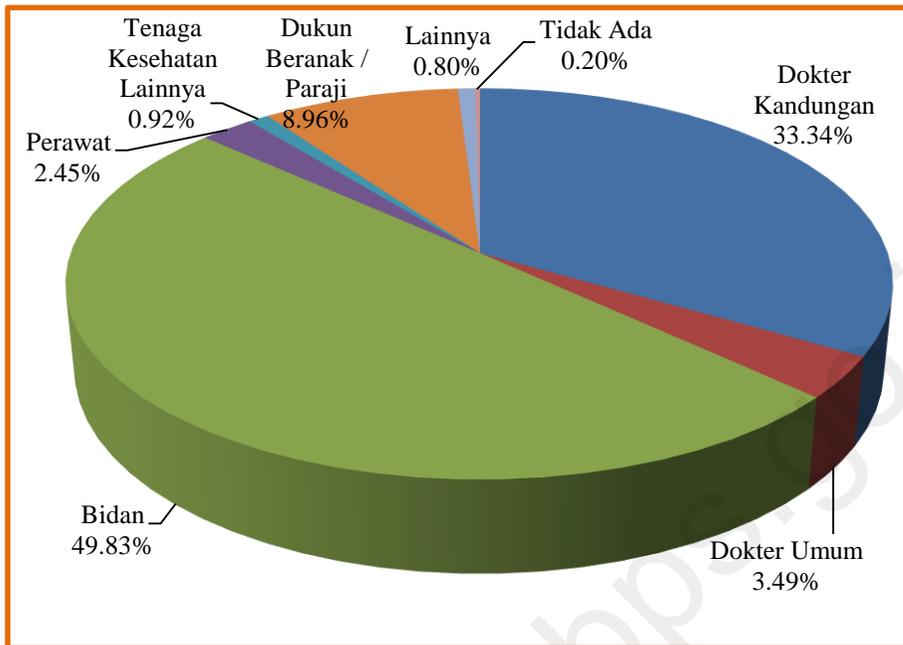
Sumber: Susenas

Balita yang pernah mendapatkan imunisasi Campak dan Hepatitis B di Sulawesi Utara masih tergolong relatif rendah, angkanya kurang dari 90 persen. Balita yang mendapatkan imunisasi BCG, DPT, dan Polio sudah lebih dari 90 persen. Persentase balita yang mendapatkan imunisasi campak paling rendah berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe (69 persen) dan yang paling tinggi adalah Kota Tomohon dengan capaian 91 persen.

2.3 Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan

Untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk, ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan merupakan salah satu faktor penentu utama. Hal yang penting lainnya adalah ketersediaan pelayanan kesehatan reproduksi yang diupayakan agar persalinan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang profesional (dokter, bidan dan tenaga kesehatan lainnya).

Gambar 2.5. Komposisi Penolong Persalinan Bayi di Sulawesi Utara (persen), 2015



Sumber: Susenas

Dalam hal tenaga persalinan, masyarakat Sulawesi Utara umumnya sudah memiliki preferensi untuk menggunakan tenaga kesehatan/medis. Sembilan puluh persen bayi yang lahir di tahun 2015 ditolong oleh tenaga kesehatan/medis. Persalinan yang ditolong oleh tenaga terdidik dan terlatih akan meningkatkan kesehatan dan kelangsungan hidup ibu dan bayi. Peningkatan persentase penolong persalinan oleh tenaga kesehatan idealnya terus meningkat dari tahun ke tahun, karena hal tersebut terkait erat dengan kelangsungan hidup ibu dan bayi yang dilahirkannya. Dari beberapa pilihan tenaga medis, lima puluh persen masyarakat lebih memilih ditolong oleh bidan pada saat persalinan. Selain karena bidan merupakan tenaga yang dilatih khusus untuk menolong persalinan, bidan juga mudah dijangkau sejak adanya program bidan desa. Di perkotaan pun bidan mudah dijangkau karena di setiap Puskesmas tersedia tenaga bidan.



Di sisi lain, masih ada 10 persen persalinan yang dilakukan oleh tenaga dukun bayi. Gambaran ini lebih umum terjadi di wilayah pedesaan. Manakala bidan sulit didapat maka dukun menjadi pilihan lain, terutama bagi desa-desa yang jauh dari jangkauan puskesmas. Dengan kondisi demikian mau tidak mau eksistensi dukun bayi tetap strategis. Program pemerintah tidak mutlak hanya dengan menambah tenaga medis tetapi juga tetap diperlukan peningkatan ketrampilan dan pengetahuan kesehatan bagi dukun bayi mengingat eksistensi mereka tadi.

Selain bidan, preferensi masyarakat Sulawesi Utara untuk memilih dokter dalam hal penolong persalinan juga cukup banyak yakni sekitar 37 persen. Masyarakat perkotaan lebih memilih dokter dibanding tenaga medis lain apalagi dukun bayi. Kemudahan mendapatkan pelayanan dokter di perkotaan menjadikan masyarakat lebih memilih dokter. Bidan biasanya tersedia di rumah bersalin dan puskesmas. Rumah sakit yang ditangani oleh dokter biasanya menjadi pilihan utama bagi masyarakat perkotaan untuk melakukan proses persalinan.

Bila dilihat menurut Kabupaten/Kota maka terdapat tiga daerah yang perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah setempat, yaitu Bolaang Mongondow Selatan, Kepl. Sangihe dan Kepl. Talaud. Daerah-daerah tersebut memerlukan perhatian yang cukup serius terutama dalam penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Di 3 daerah tersebut, penolong persalinan oleh tenaga non-kesehatan masih cukup tinggi. Sekitar 40 dari 100 wanita bersalin di Bolaang Mongondow Selatan lebih memilih ditolong oleh tenaga non-kesehatan. Demikian halnya di Kepl. Sangihe dan Kepl. Talaud, sekitar 20 dari 100 wanita bersalin lebih memilih ditolong oleh tenaga non-kesehatan. Di wilayah Kota (Manado, Tomohon, Bitung, Kotamobagu), sudah banyak yang menggunakan jasa dokter, baik dokter kandungan maupun dokter umum. Hal itu disebabkan oleh mudahnya akses ke dokter.



Akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan tidak hanya dilihat dari indikator penolong persalinan tetapi juga dapat dilihat dari ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas/tempat dan tenaga kesehatan sebagai rujukan penduduk jika mengalami keluhan sakit hingga harus pergi berobat. Dari informasi tersebut dapat teridentifikasi berbagai masalah yang dihadapi penduduk dalam mengakses dan memanfaatkan fasilitas dan layanan kesehatan.

Pada umumnya pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh penduduk sangat erat kaitannya dengan kondisi sosial ekonomi penduduk dan kondisi wilayah tempat tinggal mereka berada. Tampak perbedaan kualitas kesehatan yang nyata antara penduduk di perdesaan dan penduduk di perkotaan ini dapat disebabkan oleh ketersediaan dan jarak menuju ke fasilitas kesehatan tersebut, ditambah perilaku penduduk itu sendiri.

Tabel 2.1 Penduduk yang Berobat Jalan berdasarkan Lokasi Berobat dan Wilayah (persen), 2015

Lokasi Berobat	Kota	Desa	Kota+Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
Rumah Sakit Pemerintah	8,00	5,77	6,67
Rumah Sakit Swasta	7,18	4,92	5,83
Praktek Dokter/Bidan	41,83	47,10	44,98
Klinik/Praktek Dokter Bersama	10,33	7,50	8,64
Puskesmas/Pustu	32,75	35,04	34,11
UKBM *)	0,36	1,74	1,18
Praktek Pengobatan Tradisional	1,00	1,00	1,00
Lainnya	1,14	2,01	1,66

Sumber: Susenas

*) terdiri dari Poskesdes, Polindes, Posyandu, Balai Pengobatan



Dalam hal tempat berobat bagi penduduk yang berobat jalan, yang paling menonjol pada tahun 2015 adalah penduduk yang berobat ke praktek dokter (45 persen) dan puskesmas/pustu (34 persen). Preferensi masyarakat daerah perkotaan pun berbeda dengan masyarakat pedesaan. Penduduk perkotaan yang berobat jalan ke rumah sakit relatif lebih banyak dibandingkan dengan penduduk pedesaan. Lima belas persen penduduk perkotaan lebih memilih berobat jalan ke rumah sakit, sementara di pedesaan hanya kurang dari 11 persen. Selain itu, sekitar 47 persen penduduk pedesaan lebih memilih berobat jalan ke praktek dokter/bidan, sementara di perkotaan hanya sekitar 42 persen.



<http://sulut.bps.go.id>



3. PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu maka setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara tidak memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Hal tersebut sudah tertuang dalam UUD 1945.

Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap warganya. Melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan, dan berkualitas dari segi pembelajaran. Selain pembiayaan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum, dan sumber belajar dan daya dukung lainnya perlu diupayakan pemerintah.

Mengacu pada pembahasan di atas, hal-hal yang menyangkut dunia pendidikan akan dibahas dalam bab ini. Beberapa indikator yang akan disajikan dalam bab ini adalah Angka Melek Huruf (AMH), Angka

Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator-indikator tersebut diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2015 yang dilakukan oleh BPS.

3.1. Angka Melek Huruf (AMH)

Kemampuan baca-tulis penduduk dewasa merupakan ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan, yang tercermin dari data angka melek huruf, yaitu persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca huruf latin, huruf arab, dan atau huruf lainnya. Penduduk yang dapat membaca huruf latin, huruf arab, dan atau huruf lainnya di Sulawesi Utara pada tahun 2015 sudah mencapai 99,63 persen, sisanya sebanyak 0,39 persen adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak dapat membaca atau buta huruf.

Angka Melek Huruf (AMH) Sulawesi Utara sudah sangat tinggi. Tidak hanya di Sulawesi Utara, banyak provinsi lain di Indonesia yang juga sudah mencapai AMH yang cukup tinggi. Hanya ada 2 provinsi yang di bawah 90 persen, yaitu Nusa Tenggara Barat dan Papua. Di Provinsi Papua, AMH masih tergolong cukup rendah, kurang dari 71 persen. Dengan sudah tingginya AMH di sebagian besar wilayah Indonesia, maka AMH tersebut sudah dianggap tidak dapat membedakan kondisi pembangunan pendidikan di suatu wilayah. Oleh karena itu, AMH tidak lagi menjadi komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) lagi. AMH diganti dengan indikator *Expected Years of Schooling (EYS)* atau Harapan Lama Sekolah (HLS).



Tabel 3.1 Angka Melek Huruf (AMH) menurut Kabupaten/Kota, 2015

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Bolaang Mongondow	99,28	98,19	98,75
Minahasa	99,71	100,00	99,85
Kep. Sangihe	98,34	98,73	98,54
Kep. Talaud	99,90	99,42	99,66
Minahasa Selatan	99,91	99,72	99,82
Minahasa Utara	99,71	100,00	99,85
Bolaang Mongondow Utara	99,60	99,24	99,43
Kep. Siau Tagulandang Biaro	99,36	99,37	99,37
Minahasa Tenggara	100,00	100,00	100,00
Bolaang Mongondow Selatan	99,83	99,85	99,84
Bolaang Mongondow Timur	99,60	99,48	99,54
Manado	100,00	99,81	99,91
Bitung	99,86	99,52	99,69
Tomohon	100,00	99,83	99,92
Kotamobagu	99,66	99,68	99,67
Sulawesi Utara	99,69	99,56	99,63

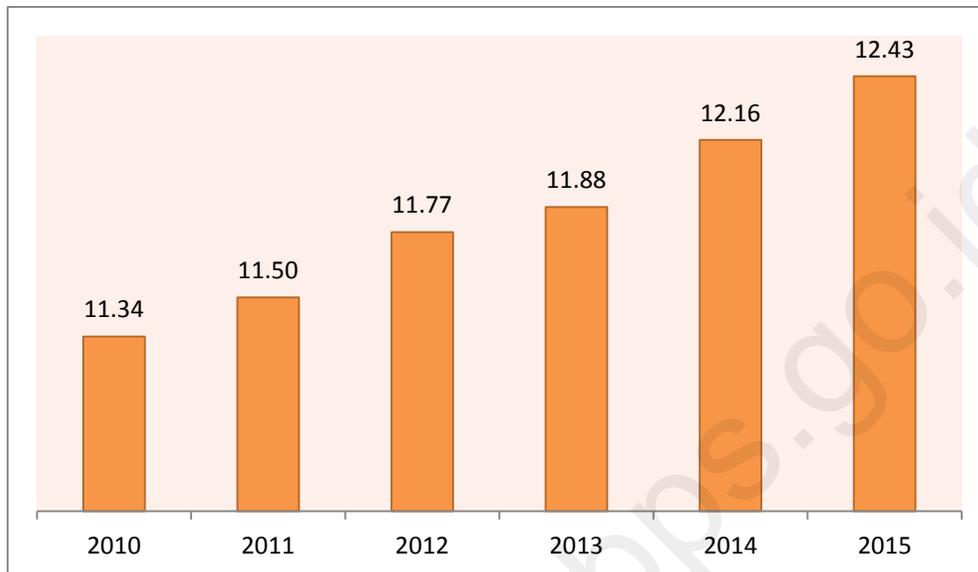
Sumber: Susenas 2015

Angka HLS didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang



ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Gambar 3.1. Harapan Lama Sekolah, 2010-2015



Sumber : Susenas 2015

Dari tahun 2010 hingga 2015 angka HLS terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 1,86 persen. Cepat lambatnya pertumbuhan angka ini dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan dalam bidang pendidikan. Rata-rata tiap orang di Sulawesi Utara pada tahun 2015 diharapkan akan melalui pendidikannya selama 12 tahun. Angka HLS merupakan indikator jangka pendek. Indikator ini dapat dengan mudah bergerak jika ada kebijakan baru dalam bidang pendidikan. Oleh sebab itu, karena dipengaruhi oleh kebijakan jangka pendek maka HLS merupakan salah satu indikator proses. Jika suatu tahapan dalam pendidikan tidak berjalan semestinya, atau jika ada kebijakan yang membuka peluang partisipasi sekolah namun tidak lagi bertahan, maka dimungkinkan terjadinya penurunan angka HLS. Satu yang harus diingat adalah, indikator pendidikan mengukur manusianya. Pendidikan itu tidak semata-mata dipengaruhi oleh fasilitas, infrastruktur dan kebijakan, sebab manusia itu kompleks. Tanpa ada



kemauan dari pribadi seseorang untuk meningkatkan taraf pendidikannya, segala fasilitas, infrastruktur dan kebijakan, sebaik apapun itu, tidak akan ada artinya.

3.2. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal. Indikator ini dihitung dari penduduk yang berusia 25 tahun ke atas karena mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP, sehingga dapat dibandingkan hingga level dunia. Selain itu dipilih penduduk umur 25 tahun ke atas karena asumsinya pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting sebagai salah satu komponen pembentuk indeks pendidikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Rata-rata lama sekolah penduduk Sulawesi Utara tahun 2015 adalah 8,88 tahun. Mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya hanya 0,02 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk Sulawesi Utara baru mampu menempuh pendidikan hingga lulus SMP.

Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, Kota Manado merupakan wilayah di Sulawesi Utara yang memiliki rata-rata lama sekolah tertinggi. Rata-rata lama sekolah penduduk di Kota Manado sebesar 11,02 tahun, berarti penduduk manado rata-rata bersekolah hingga kelas 2 SMA. Sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow, yaitu sebesar 7,14 tahun. Kota Manado sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Utara tentu kondisi masyarakatnya lebih heterogen dibandingkan daerah lain. Dengan berbagai macam daya tarik yang ada di Manado, mengundang penduduk dari wilayah lain untuk bertempat tinggal di kota ini. Masyarakat pendatang ini juga sangat mempengaruhi rata-rata lama sekolah di suatu



daerah. Jika masyarakat pendatang banyak yang menamatkan pendidikan tinggi, tentunya rata-rata lama sekolah akan terdongkrak naik. Begitu juga sebaliknya, jika masyarakat pendatang banyak yang berpendidikan rendah, tentunya akan menekan rata-rata lama sekolah suatu wilayah.

Tabel 3.2 Rata-rata Lama Sekolah per Kabupaten/ Kota di Sulawesi Utara, 2015

Kabupaten/Kota	2014	2015
(1)	(2)	(3)
Bolaang Mongondow	7,13	7,14
Minahasa	9,53	9,54
Kep. Sangihe	7,34	7,50
Kep. Talaud	8,73	8,82
Minahasa Selatan	8,47	8,70
Minahasa Utara	9,07	9,23
Bolaang Mongondow Utara	7,51	7,52
Kep. Siau Tagulandang Biaro	8,18	8,34
Minahasa Tenggara	8,37	8,38
Bolaang Mongondow Selatan	7,68	7,70
Bolaang Mongondow Timur	7,28	7,38
Manado	11,01	11,02
Bitung	9,26	9,28
Tomohon	10,20	10,22
Kotamobagu	9,75	9,75
Sulawesi Utara	8,86	8,88

Sumber: Susenas 2015

Minahasa Selatan merupakan kabupaten yang mengalami kenaikan rata-rata lama sekolah yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2014. Pada tahun 2014 rata-rata lama sekolah Minahasa Selatan sebesar 8,47, sedangkan pada tahun 2015 naik menjadi 8,70. Sedangkan wilayah yang



paling stagnan adalah Kota Kotamobagu. Rata-rata lama sekolah di Kotamobagu pada tahun 2015 adalah 9,75. Jika dibandingkan tahun 2014 tidak mengalami perubahan. Kabupaten Bolaang Mongondow, Minahasa, Bolaang Mongondow Utara, Minahasa Tenggara, dan Kota Manado hanya mengalami kenaikan 0,01 poin jika dibandingkan dengan tahun 2014.

3.3. Tingkat Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian/keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikan yang tinggi dapat mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan/keahlian yang tinggi. Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan juga dapat digunakan untuk mengetahui program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah.

Tabel 3.3 Penduduk 15 tahun keatas per Jenis Kelamin Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan (persen), 2015

Pendidikan yang Ditamatkan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Tamat SD	17,79	17,28	17,54
Sekolah Dasar	20,26	20,00	20,13
SLTP	23,91	22,12	23,03
Sekolah Menengah/SMU	23,97	24,47	24,22
SM Kejuruan	6,33	6,87	6,59
Diploma I/II	0,48	0,79	0,63
Diploma III/Sarmud	1,19	1,35	1,27
Diploma IV/S I ke atas	6,07	7,12	6,59
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas 2015



Pemerintah Sulawesi Utara telah melakukan berbagai macam cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan sehingga diharapkan dapat menciptakan lulusan yang lebih berkualitas yang dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia Sulawesi Utara. Gambaran mengenai peningkatan SDM dapat dilihat dari kualitas tingkat pendidikan penduduk usia 15 tahun keatas yang sudah menamatkan sekolah. Lebih dari setengah penduduk usia 15 tahun ke atas di Sulawesi Utara sudah menamatkan pendidikan minimal SLTP (62,33 persen) dan sisanya adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang tidak punya ijazah (17,54 persen) dan tamat SD (20,13 persen).

Dalam hal pendidikan terlihat bahwa telah terjadi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut dapat dilihat pada statistik pendidikan yang ditamatkan. Tidak ada perbedaan nyata antara persentase perempuan yang menamatkan pendidikan tertentu dengan persentase laki-laki pada tingkat pendidikan yang sama. Tipisnya perbedaan menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kesempatan belajar antara laki-laki dan perempuan di Sulawesi Utara. Budaya masa lalu dimana perempuan tidak perlu sekolah karena dipersiapkan untuk mengurus rumah tangga saja sejak lama tidak tergambar di masyarakat Sulawesi Utara. Jika ada perbedaan dalam hal persentase, dimungkinkan lebih dipengaruhi oleh kemauan pribadi.

3.4. Tingkat Partisipasi Sekolah (APS, APK, dan APM)

Tingkat partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Program Wajib Belajar 9 tahun di Sulawesi Utara belum sepenuhnya berhasil. Ditunjukkan dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada anak usia 13-15 tahun yang sebesar 94,59 persen. Dengan kata lain masih ada 5,41 persen anak usia SMP yang seharusnya bersekolah ternyata sudah berhenti



atau putus sekolah. APS menunjukkan persentase anak usia sekolah yang sedang berada di jenjang pendidikan tertentu. Semakin besar nilai APS semakin berhasil program peningkatan kualitas pendidikan di suatu daerah.

Pada anak usia 7-12 tahun, APS menunjukkan angka yang baik, yaitu 99,33 persen. Pada kelompok usia SLTA (16-18 tahun) APS jelas akan lebih kecil dibandingkan usia SMP, yaitu sekitar 72,22 persen, karena banyak diantara mereka sudah terjun ke dunia kerja. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin banyak anak yang berhenti sekolah atau tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

Tabel 3.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Usia Sekolah, 2015

Usia Sekolah (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
7 – 12	98,96	99,70	99,33
13 – 15	93,03	96,23	94,59
16 – 18	70,91	73,64	72,22

Sumber: Susenas 2015

Isu *gender* pada indikator APS Sulawesi Utara cukup menarik. Umumnya di Indonesia ataupun di negara-negara berkembang biasanya anak-anak perempuan ada diskriminasi untuk menikmati pendidikan. Mereka lebih dieksploitasi untuk membantu orang tuanya dalam mengurus urusan rumah tangga ataupun bekerja. Anak laki-laki justru mendapat perhatian lebih dalam hal pendidikan karena dialah yang diharapkan akan mengembalikan investasi sekolah atau dengan kata lain ada anggapan *rate of return* investasi pendidikan pada anak laki-laki lebih besar dibanding perempuan. Di Sulawesi Utara yang terjadi sebaliknya, anak perempuan memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi dibanding anak laki-laki pada jenjang umur 7-12, 13-15, dan 16-18 tahun. Perlu ada penelitian lebih lanjut mengenai penyebab pasti kondisi tersebut terjadi di Sulawesi Utara.



Tabel 3.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan, 2015

Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	112,39	110,04	111,23
SMP/SLTP	89,77	92,41	91,06
SMA/SLTA	83,04	89,88	86,30

Sumber: Susenas 2015

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan proporsi anak sekolah pada jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. APK dimungkinkan lebih dari 100 persen karena ada penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu ada yang di luar kelompok usia yang seharusnya.

Tabel 3.6 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan, 2015

Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	93,49	94,46	93,97
SMP/SLTP	70,28	75,89	73,02
SMA/SLTA	60,30	64,34	62,23

Sumber: Susenas 2015

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan proporsi penduduk pada kelompok usia tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu. Pada tahun 2015 APM SD/Sederajat di Sulawesi Utara sebesar 93,97 persen, artinya tidak seluruh anak usia 7-12 tahun yang masih sekolah, bersekolah pada jenjang SD/ sederajat.



4. KETENAGAKERJAAN

Salah satu masalah besar yang menjadi perhatian pemerintah adalah permasalahan di bidang ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak merupakan sebagian kecil masalah yang dihadapi oleh pemerintah.

Bab ini menjelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan. Sumber data penghitungan indikator ini diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Indikator tersebut antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dan jam kerja.

4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun keatas). Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan

untuk mengukur pengangguran yaitu TPT. Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Tabel 4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (persen), 2013 - 2015

Indikator	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
TPAK	59,41	59,99	61,28
TPT	6,79	7,54	9,03

Sumber: Sakernas

TPT Sulawesi Utara mengalami kenaikan dalam 3 tahun terakhir. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) menunjukkan angka 6,79 persen pada tahun 2013 menjadi 9,03 pada tahun 2015. Sejalan dengan TPT, TPAK juga mengalami kenaikan, dari 59,41 persen di tahun 2013 menjadi 61,28 persen di tahun 2015. Penambahan angkatan kerja yang dibarengi dengan bertambahnya pengangguran mengindikasikan kurangnya lapangan kerja di Sulawesi Utara yang dapat menarik para pengangguran masuk ke dalamnya.

Pengangguran di perkotaan lebih tinggi dibandingkan pedesaan. TPT wilayah perkotaan sebesar 11,54 persen, sedangkan di daerah pedesaan sebesar 6,57 persen. Banyaknya jumlah dan jenis pekerjaan di wilayah perkotaan ternyata tidak mampu menampung seluruh penduduk usia kerja yang tersedia.



Jika dibandingkan dengan TPAK, kondisi di perkotaan tidak berbeda jauh dibandingkan wilayah pedesaan. TPAK wilayah perkotaan sebesar 60,77 persen dan wilayah pedesaan sebesar 61,79 persen. Hal ini berarti ada sekitar 60 hingga 61 angkatan kerja dalam 100 penduduk usia produktif di perkotaan. TPAK pedesaan lebih besar dibandingkan perkotaan, menyiratkan bahwa wilayah pedesaan mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Angkatan kerja di pedesaan lebih banyak dibanding di perkotaan namun penganggurannya lebih rendah, merupakan sudut pandang lain yang mempertegas hal ini. Sebaliknya, fenomena yang terjadi di perkotaan, angkatan kerja lebih rendah dari wilayah pedesaan dan pengangguran tinggi. Banyak kemungkinan yang menjadi penyebab kurang diserapnya tenaga kerja. Faktor perilaku selektifnya penduduk perkotaan dalam memilih pekerjaan diduga menjadi salah satu penyebabnya.

Berdasarkan kabupaten/kota, pada tahun 2015 ada 6 kabupaten/kota yang Tingkat Pengangguran Terbukanya berada di atas tingkat pengangguran Sulawesi Utara, yaitu Minahasa (9,62 persen), Minahasa Utara (10,08 persen), Kotamobagu (10,17 persen), Tomohon (10,94 persen), Bitung (11,87 persen), dan Manado (14,28 persen). Perlu perhatian khusus dari pemerintah dan pihak swasta supaya terbuka lapangan kerja yang dapat menurunkan tingkat pengangguran di enam wilayah tersebut.

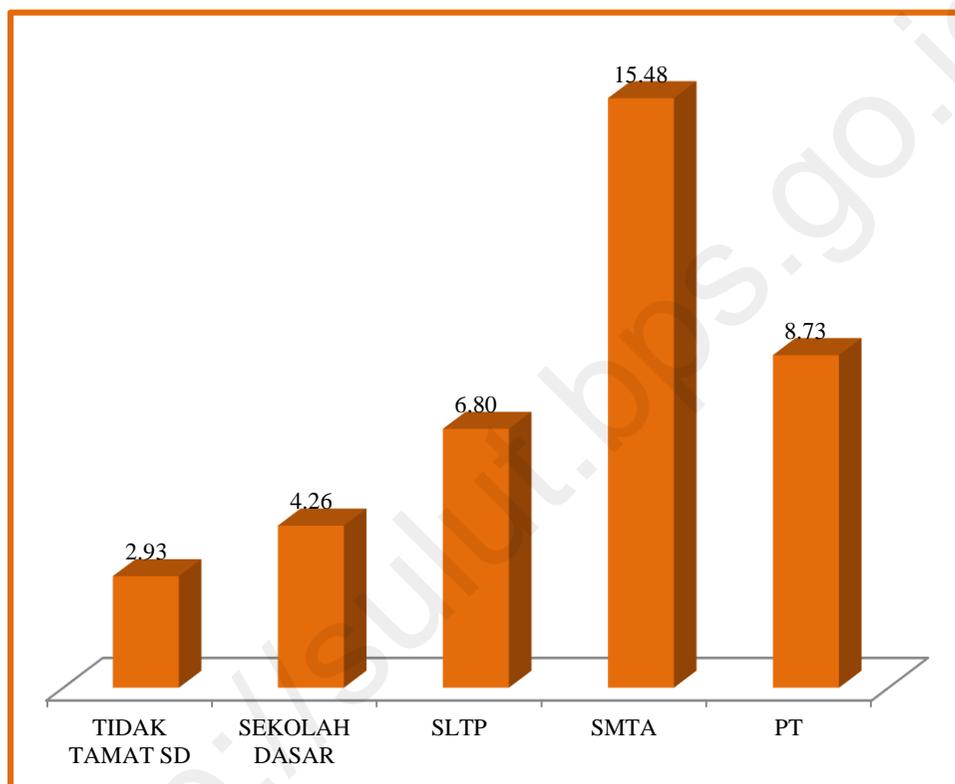
4.2. Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan

Setiap orang selalu berharap dirinya akan mudah mendapatkan pekerjaan layak yang sesuai dengan keahlian yang dia miliki serta tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berdampak pada semakin tinggi pula harapan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Namun, keterbatasan lapangan kerja yang tersedia bagi mereka yang mempunyai ijazah tinggi menyebabkan mereka tidak terserap pada lapangan usaha



tersebut. Sebagian besar dari mereka yang merupakan lulusan pendidikan tinggi enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis keahlian dan jenjang pendidikan yang telah ditamatkan. Sebagian dari mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan menjadi penganggur.

Gambar 4.1. Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan (persen), 2015



Sumber: Sakernas 2015

Pada tahun 2015 kebanyakan penduduk Sulawesi Utara penganggur adalah yang berpendidikan SMA, yaitu sekitar 15 persen. Penganggur yang tidak tamat SD lebih kecil dibandingkan dengan penganggur yang sudah menamatkan pendidikan tinggi di perguruan tinggi. Kurang dari 3 persen penganggur tidak menamatkan SD, sedangkan penganggur yang sudah menamatkan perguruan tinggi hampir mencapai 9 persen. Penganggur yang sudah tamat perguruan tinggi inilah yang kemudian disebut dengan



penganggur intelektual. Penganggur intelektual ini menempati urutan ke 2 terbanyak setelah penganggur yang tamat SMA.

Jika dilihat dari sudut pandang tipe wilayah perkotaan dan pedesaan, di kedua wilayah tersebut penganggur tamatan SMA sama-sama paling banyak. Perbedaan terlihat di peringkat persentase penganggur intelektual. Di daerah perkotaan, urutan kedua terbanyak adalah pengangguran intelektual (8,5 persen), sedangkan di daerah pedesaan (9,2 persen) pengangguran intelektual menempati persentase terbesar ketiga. Di daerah perkotaan, penganggur kebanyakan berpendidikan tamat SMA dan SMP. Sedangkan di daerah pedesaan, penganggur kebanyakan berpendidikan tamat SMA dan Perguruan Tinggi.

4.3. Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada bahasan ini dibagi menjadi 3 sektor lapangan usaha yaitu pertanian (pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan), industri (pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas, dan air serta bangunan/konstruksi), dan jasa-jasa (perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel, angkutan, pergudangan, komunikasi, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan, serta jasa kemasyarakatan).

Tabel 4.2. Komposisi Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Usaha (persen), 2015

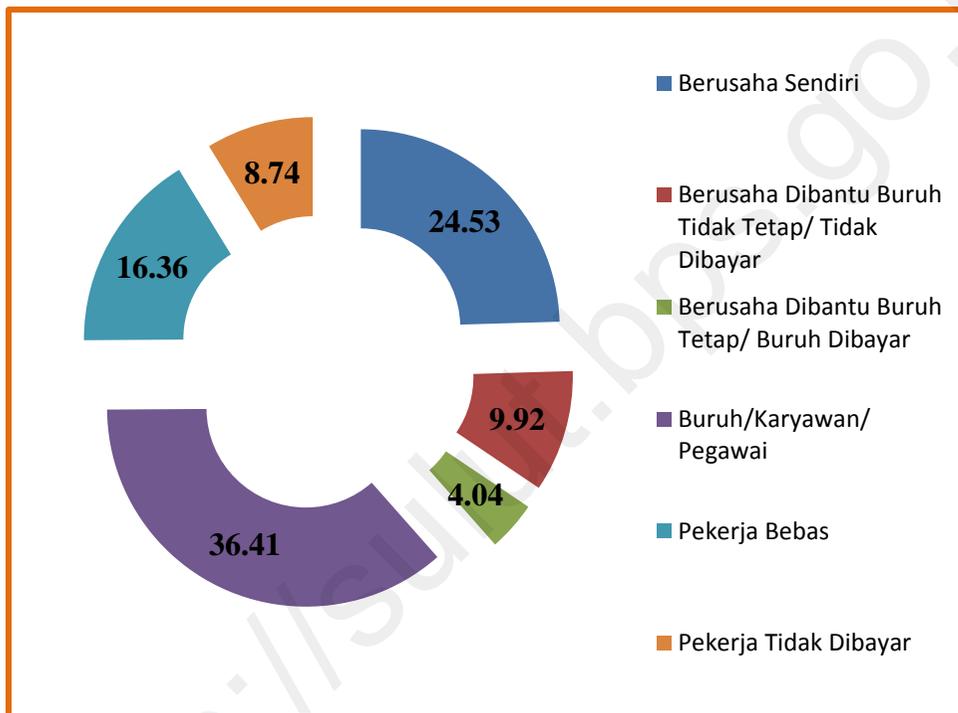
Lapangan Usaha	Kota	Desa	Kota+Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian	11,42	50,90	31,93
Industri	19,12	15,85	17,42
Jasa	69,46	33,25	50,65
JUMLAH	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sakernas 2015



Sektor jasa merupakan lapangan usaha favorit di Sulawesi Utara. Sebanyak 50,6 persen penduduk bekerja di sektor jasa, sedangkan sektor industri masih belum banyak diminati oleh penduduk. Penduduk yang bekerja pada sektor jasa mendominasi wilayah perkotaan (69,5 persen), sementara di pedesaan didominasi oleh sektor pertanian (51 persen).

Gambar 4.2. Komposisi Status Pekerjaan Penduduk yang Bekerja (persen), 2015



Sumber: Sakernas 2015

Pada tahun 2015 penduduk bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai sebesar 36,4 persen. Status pekerjaan terbanyak kedua adalah berusaha sendiri (24,5 persen). Selain itu, penduduk yang bekerja sebagai pekerja bebas juga cukup banyak (16 persen). Pekerja bebas ini terdiri dari 2, yaitu pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas non pertanian. Pekerja bebas di pertanian lebih banyak dibandingkan dengan pekerja bebas di non pertanian, namun tidak banyak selisihnya.



Lebih dari 50 persen penduduk perkotaan berstatus buruh/karyawan/pegawai, kurang dari 50 persen sisanya adalah pengusaha, pekerja bebas dan pekerja tidak dibayar. Komposisi ini cukup berbeda dengan kondisi di pedesaan. Sekitar 25 persen penduduknya adalah pengusaha tanpa buruh/pekerja, dua puluh lima persen berikutnya berstatus buruh/karyawan/pegawai dan sisanya adalah pengusaha dengan buruh, pekerja bebas dan pekerja tidak dibayar.

4.4. Jumlah jam Kerja

Terkait dengan jumlah jam kerja yang dihabiskan selama seminggu, seorang pekerja dapat dikategorikan sebagai pengangguran tidak kentara atau terselubung dimana mereka bekerja jauh di bawah jam kerja rata-rata selama seminggu (kurang dari 35 jam). Biasanya pekerja semacam ini memiliki pendapatan dibawah kemampuan sebenarnya. Selain itu seseorang yang terpaksa bekerja di bawah 35 jam merupakan orang-orang yang mempunyai kemampuan tetapi tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, keahlian atau keterampilannya. Sementara itu, seorang pekerja yang dikategorikan sebagai bukan setengah pengangguran adalah mereka yang memiliki jumlah jam kerja normal selama seminggu (minimal 35 jam).

Tabel 4.3 Penduduk yang Bekerja menurut Jam Kerja (Ribuan), 2013 - 2015

Jam kerja (jam)	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1 – 34	296,6	272,88	261,82
35 + *)	668,86	707,88	738,21
JUMLAH	965,46	980,76	1.000,03

Sumber: Sakernas

Catatan : *) termasuk sementara tidak bekerja

Jumlah pengangguran terselubung di Sulawesi Utara mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir. Seiring dengan meningkatnya jumlah pekerja selama kurun waktu 3 tahun, jumlah pekerja dengan jam kerja normal pun juga mengalami kenaikan. Persentase penduduk perkotaan yang bekerja dibawah jam kerja normal (sekitar 19 persen) lebih kecil jika dibandingkan persentase pengangguran terselubung yang ada di pedesaan (32 persen). Dengan kata lain, pekerja yang memiliki jam kerja normal di perkotaan lebih besar dibandingkan dengan pedesaan.



5. TARAF DAN POLA KONSUMSI

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain, rumah tangga/keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan persentase pengeluaran untuk non makanan.

5.1. Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat

kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk meningkat dari Rp 791.494 menjadi Rp 820.426 selama periode 2014-2015. Bila dilihat persentasenya, persentase pengeluaran untuk makanan juga meningkat dari 50,44 persen menjadi 51,96 persen. Begitu juga sebaliknya, persentase pengeluaran untuk non makanan mengalami penurunan dari 49,56 persen menjadi 48,04 persen. Hal ini merupakan indikasi dini adanya penurunan kesejahteraan masyarakat, meskipun tidak signifikan mengalami penurunan. Penurunan persentase pada kelompok bukan makanan hampir merata di semua sub kelompok non makanan kecuali pengeluaran untuk perumahan dan keperluan pesta. Persentase pengeluaran untuk perumahan dan keperluan pesta mengalami kenaikan.

Tabel 5.1 Rata-rata Pengeluaran Perkapita menurut Jenis Pengeluaran, 2014-2015

Jenis Pengeluaran	Nominal (Rp)		Persentase (%)	
	2014	2015	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
Makanan	399.223	426.278	50,44	51,96
Non Makanan	392.271	394.149	49,56	48,04
Perumahan	170.669	205.488	21,56	25,05
Barang dan Jasa	103.750	71.899	13,11	8,76
Pakaian dan Alas Kaki	22.924	16.928	2,90	2,06
Barang Tahan Lama	20.106	14.378	2,54	1,75
Pajak dan Asuransi	27.684	27.299	3,50	3,33
Keperluan Pesta	19.468	29.309	2,46	3,57

Sumber: Susenas



Dengan asumsi bahwa penduduk yang persentase pengeluaran non makanannya lebih besar dari pengeluaran makanan merupakan penduduk yang sejahtera, maka kita dapat mengatakan penduduk Sulawesi Utara yang sejahtera adalah penduduk yang berpenghasilan lebih dari Rp 1.000.000 per bulan. Artinya jika dalam 1 rumah tangga terdiri dari 4 anggota rumah tangga, maka penghasilan rumah tangga tersebut minimal Rp 4.000.000 per bulan. Wilayah Kabupaten/Kota yang memiliki masyarakat yang sudah sejahtera adalah Minahasa, Manado, Tomohon, dan Kotamobagu.

Peningkatan pendapatan idealnya diikuti dengan pemerataan pendapatan, karena pemerataan pendapatan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Tidak tersedianya data pendapatan menyebabkan penghitungan distribusi pendapatan menggunakan data pengeluaran sebagai *proxy* pendapatan, yaitu mendekati pendapatan dengan pengeluaran. Walaupun dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, paling tidak pendekatan ini dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi. Salah satu indikator untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan penduduk adalah indeks gini atau *gini ratio*.

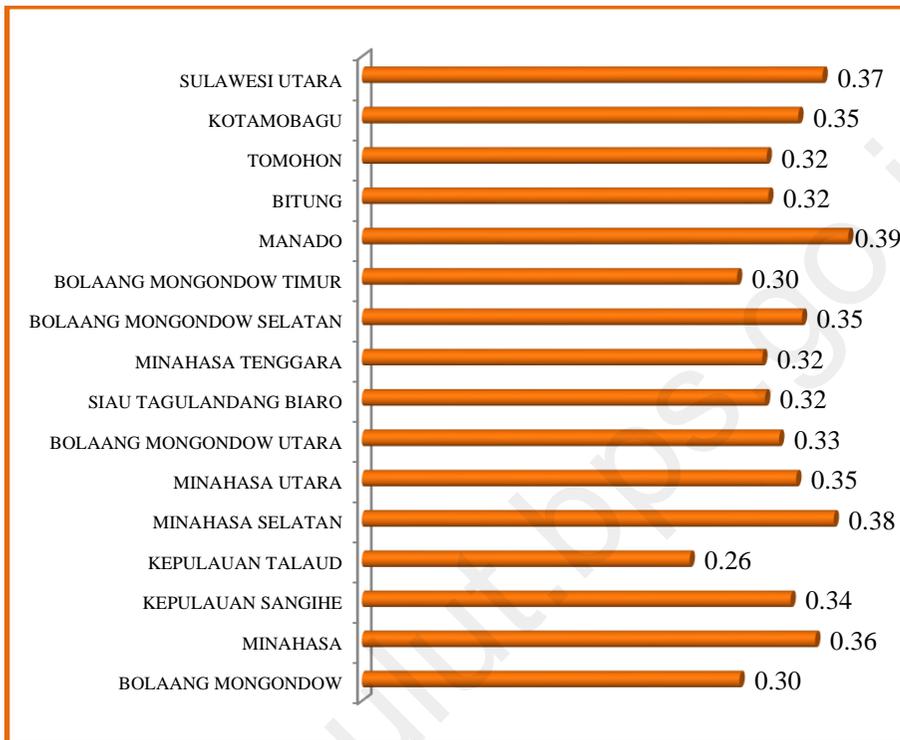
Indeks gini Sulawesi Utara Maret 2015 sebesar 0,37, artinya ketimpangan pendapatan penduduk di Sulawesi Utara masih dalam tingkat yang sedang. Semakin tinggi indeks gini, maka semakin timpang pendapatan antar penduduk. Penduduk kaya makin kaya, penduduk miskin makin miskin.

Jika dilihat menurut Kabupaten/Kota, hanya Kabupaten Talaud yang memiliki indeks gini yang bernilai kurang dari 0,30. Pendapatan antar penduduk di Kabupaten Talaud memiliki ketimpangan yang rendah atau relatif homogen. Indeks gini tertinggi berada di Kota Manado, yaitu sebesar 0,39. Penduduk yang lebih heterogen diduga menyebabkan indeks gini di



Kota Manado menjadi yang paling tinggi di Sulawesi Utara. Tetapi, indeks gini di Kota Manado masih dalam kategori ketimpangan sedang.

Gambar 5.1. Gini Ratio menurut Kabupaten/Kota, 2015



Sumber: Susenas 2015

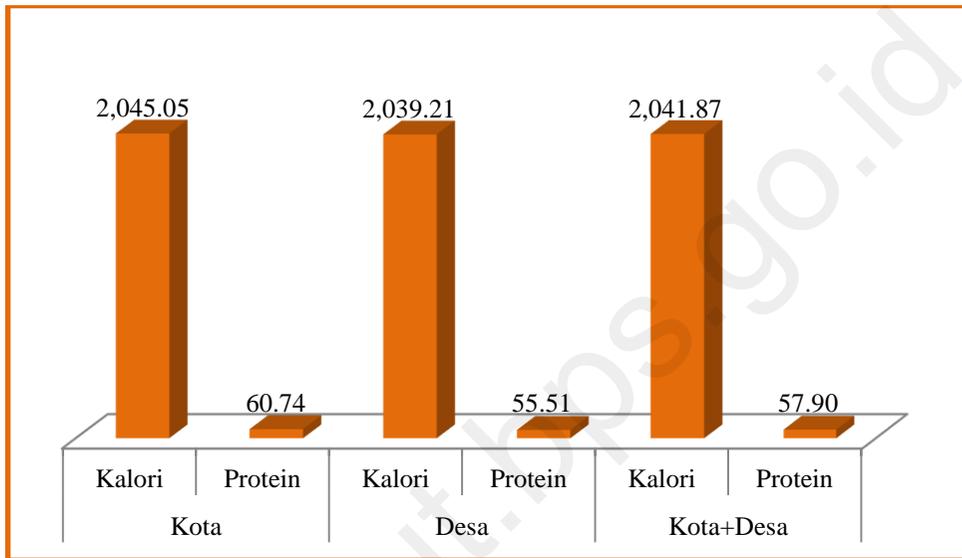
5.2. Konsumsi Kalori dan Protein

Tingkat kecukupan gizi yang mencakup konsumsi kalori dan protein merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI



Nomor 75 Tahun 2013 (Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI tahun 2012), rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2150 kkal dan 57 gram protein.

Gambar 5.2. Rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Sulawesi Utara, 2015



Sumber: Susenas 2015

Pada tahun 2015 energi yang dikonsumsi penduduk Sulawesi Utara belum memenuhi angka kecukupan energi yang ditetapkan yaitu 2.150 kkal per hari. Penduduk Sulawesi Utara baru mengkonsumsi kalori sekitar 2.042 kkal per hari. Sedangkan untuk konsumsi protein, penduduk Sulawesi Utara sudah melampaui angka kecukupan protein yang ditetapkan, sebesar 57 gram per hari. Penduduk Sulawesi Utara sudah mengkonsumsi protein sebesar 57,9 gram per hari. Nampak juga bahwa baik konsumsi kalori maupun protein penduduk perkotaan lebih tinggi dibandingkan penduduk perdesaan. Konsumsi kalori dan protein penduduk perkotaan masing-masing sebesar 2.045 kkal dan 60,74 gram per hari. Konsumsi kalori dan protein penduduk perdesaan masing-masing sebesar 2.039 kkal dan 55,51 gram per hari.

<http://sulut.bps.go.id>



6. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Sepanjang kehidupannya, manusia selalu membutuhkan rumah yang merupakan salah satu kebutuhan pokok hidupnya selain sandang dan pangan untuk mempertahankan diri dari keganasan alam. Dengan kata lain, rumah merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi untuk dapat terus bertahan hidup. Apabila rumah sebagai salah satu kebutuhan pokok tersebut tidak dapat tersedia, maka manusia akan sulit untuk hidup secara layak.

Selanjutnya, manusia sebagai makhluk sosial selalu ingin hidup bersama dengan orang lain dan berinteraksi antara satu dengan lainnya, sehingga satu persatu bangunan rumah tinggal bermunculan sampai terbentuk suatu pemukiman rumah penduduk.

Manusia membutuhkan rumah disamping sebagai tempat untuk berteduh dan berlindung dari hujan maupun panas, rumah juga diperlukan untuk memberi rasa aman penghuninya dari gangguan yang tidak diinginkan. Rumah menjadi tempat berkumpul bagi para penghuni rumah yang biasanya merupakan satu ikatan keluarga. Rumah dapat dijadikan sebagai salah satu indikator bagi kesejahteraan pemiliknya. Semakin baik fasilitas yang dimiliki, dapat diasumsikan semakin sejahtera rumahtangga yang menempati rumah tersebut. Berbagai fasilitas yang dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan tersebut antara lain dapat dilihat dari luas lantai rumah, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar rumahtangga dan juga tempat penampungan kotoran terakhir.

6.1. Kualitas Rumah Tinggal

Rumah merupakan tempat berkumpul bagi semua anggota keluarga sebagai tempat untuk menghabiskan sebagian besar waktu mereka, sehingga kondisi kesehatan perumahan juga sangat terkait erat dengan kondisi

kesehatan setiap anggota keluarga maupun tetangga sekitar. Bila kondisi perumahan sehat, tentunya peluang setiap anggota rumahtangga untuk memiliki kondisi tubuh yang sehat juga sangat besar. Namun sebaliknya, jika kondisi rumah tidak sehat maka potensi terjadi penularan penyakit juga sangat besar.

Salah satu ukuran yang digunakan untuk menilai kesehatan perumahan diantaranya adalah luas lantai rumah/tempat tinggal. Luas lantai rumah tempat tinggal selain digunakan sebagai indikator untuk menilai kemampuan sosial masyarakat, secara tidak langsung juga dikaitkan dengan sistem kesehatan lingkungan keluarga atau tempat tinggal (perumahan). Tabel 6.1 memberi gambaran bahwa terlepas dari kepemilikan, sebagian masyarakat Sulawesi Utara tinggal di rumah yang kualitasnya cukup baik, yaitu beratap layak, berdinding permanen dan berlantai bukan tanah.

Tabel 6.1 Rumahtangga menurut Indikator Kualitas Perumahan (persen), 2014 – 2015

Indikator	2014	2015
(1)	(2)	(3)
Lantai Tanah (persen)	4,28	4,82
Atap Layak * (persen)	97,71	97,88
Dinding Permanen (persen)	93,74	94,43
Rata-rata luas lantai perkapita (m ²)	20,13	21,11

Sumber : Susenas

Catatan : * Tidak beratap dedaunan

Luas lantai erat kaitannya dengan tingkat kepadatan hunian atau rata-rata luas ruang untuk setiap anggota keluarga. Luas lantai perkapita juga digunakan untuk mengukur apakah suatu rumah merupakan perumahan yang layak huni atau tidak. MDGs menetapkan standar luas lantai perkapita menjadi salah satu indikator rumah kumuh. Rumah tangga dengan luas lantai



perkapita kurang dari 7,2 m² masuk dalam salah satu kriteria rumah kumuh. Kriteria rumah kumuh tidak hanya dilihat dari luas lantai perkapita, oleh sebab itu tidak dapat serta merta menyatakan rumah tangga dengan luas lantai perkapita kurang dari 7,2 m² masuk dalam kategori menempati rumah kumuh. Dengan mengadopsi standar MDGs tersebut, masih terdapat sekitar 14 persen rumah tangga yang menempati rumah dengan luas lantai perkapita kurang 7,2 m² di Sulawesi Utara pada tahun 2015. Tabel 6.1 juga memberi gambaran bahwa masyarakat Sulawesi Utara umumnya menempati luas lantai perkapita yang sudah layak, jauh di atas standar kumuh, rata-rata seorang penduduk menguasai lantai rumah sekitar 21 m².

Jika dilihat per kabupaten/kota, masih ada sekitar 8 persen rumahtangga di Kota Manado yang tinggal di rumah yang mempunyai luas kurang dari 20 m². Hal ini lazim ditemui di Provinsi Sulawesi Utara karena hubungan kekerabatan yang masih erat, sehingga beberapa anggota rumahtangga yang sudah berkeluarga menempati rumah yang sama dengan keluarga-keluarga lain yang masih memiliki ikatan persaudaraan. Sementara itu, hanya kurang dari 1 persen rumah tangga di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang mempunyai luas lantai rumah kurang dari 20 m².

Selain luas lantai, jenis lantai juga dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat kualitas perumahan. Semakin baik kualitas lantai perumahan dapat diasumsikan semakin membaik tingkat kesejahteraan penduduknya. Rumahtangga dengan jenis lantai keramik atau marmer mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih baik daripada rumahtangga yang mempunyai jenis lantai semen, ubin atau tanah. Selain itu, jenis lantai juga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Lantai tanah dapat menjadi media yang subur bagi timbulnya kuman penyakit dan media penularan bagi jenis penyakit tertentu, seperti penyakit diare, cacangan dan penyakit kulit. Berdasarkan data Susenas 2015, masih hampir 5 persen rumahtangga di Sulawesi Utara yang berlantaikan tanah. Semakin rendah persentase



rumah tangga yang mendiami rumah dengan lantai tanah akan berpengaruh pada tingginya derajat kesehatan masyarakat.

Indikator kualitas perumahan yang lain diantaranya adalah rumah tangga dengan atap yang layak (tidak beratap dedaunan) dan dinding permanen. Mayoritas masyarakat di Sulawesi Utara tinggal di rumah yang beratap seng. Data tahun 2015 menunjukkan bahwa hampir 98 persen rumah tangga tinggal di rumah yang beratap layak dan 94 persen rumah tangga rumahnya ber dinding permanen.

6.2. Fasilitas Rumah Tinggal

Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah akan menentukan nyaman atau tidaknya suatu rumah tinggal, yang juga menentukan kualitas suatu rumah tinggal. Fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali adalah tersedianya sarana penerangan listrik, air bersih serta jamban dengan tangki septik.

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah. Dalam bahasan ini, cakupan air bersih yang dimaksud adalah air kemasan, air isi ulang, air ledeng, air pompa, air sumur terlindung dan air yang bersumber dari mata air yang jaraknya lebih dari 10m dari pembuangan akhir tinja.

Pada tahun 2015, hampir 74 persen rumah tangga di Sulawesi Utara dapat mengakses air minum bersih. Rumah tangga di daerah perkotaan lebih banyak mengkonsumsi air minum bersih dibandingkan dengan rumah tangga pedesaan. Ada dua kabupaten/kota di Sulawesi Utara yang mayoritas penduduknya masih sulit mengakses minum bersih. Hanya kurang dari 46 persen penduduk di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan kurang dari 45 persen penduduk di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang dapat mengakses air minum bersih.



Sistem pembuangan kotoran/air besar manusia sangat erat kaitannya dengan kondisi lingkungan dan resiko penularan suatu penyakit, khususnya penyakit saluran pencernaan. Klasifikasi sarana pembuangan kotoran dilakukan berdasarkan atas tingkat resiko pencemaran yang mungkin ditimbulkan. Masalah kondisi lingkungan tempat pembuangan kotoran manusia tidak terlepas dari aspek kepemilikan terhadap sarana yang digunakan terutama dikaitkan dengan tanggungjawab dalam pemeliharaan dan kebersihan sarana. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik. Di Sulawesi Utara, pada tahun 2015 terdapat sekitar 68 persen rumahtangga yang memiliki jamban sendiri dengan tangki septik.

Tabel 6.2. Rumah Tangga menurut Indikator Fasilitas Perumahan (persen), 2015

Indikator	Kota	Desa	Kota+Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
Air kemasan, air isi ulang, & ledeng	66,51	29,81	46,71
Air minum bersih *	82,96	66,30	73,97
Jamban sendiri	76,21	67,94	71,75
Jamban sendiri dengan tangki septik	66,00	50,87	57,84
Sumber penerangan listrik	99,72	98,63	99,13

Sumber : Susenas 2015

Catatan : * Air yang bersumber dari ledeng, air kemasan, pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah > 10 m

Nampak juga di perkotaan lebih banyak rumah tangga yang menggunakan jamban sendiri dan tangki septik dibandingkan di pedesaan. Rumah tangga di pedesaan kemungkinan masih kental rasa persaudaraannya sehingga masih ada rumah tangga yang menumpang ke jamban tetangga. Kemungkinan lain adalah di daerah pelosok, masih ada jamban umum yang



dapat digunakan bersama-sama dalam satu lingkungan/jaga/lindungan atau bahkan satu desa.

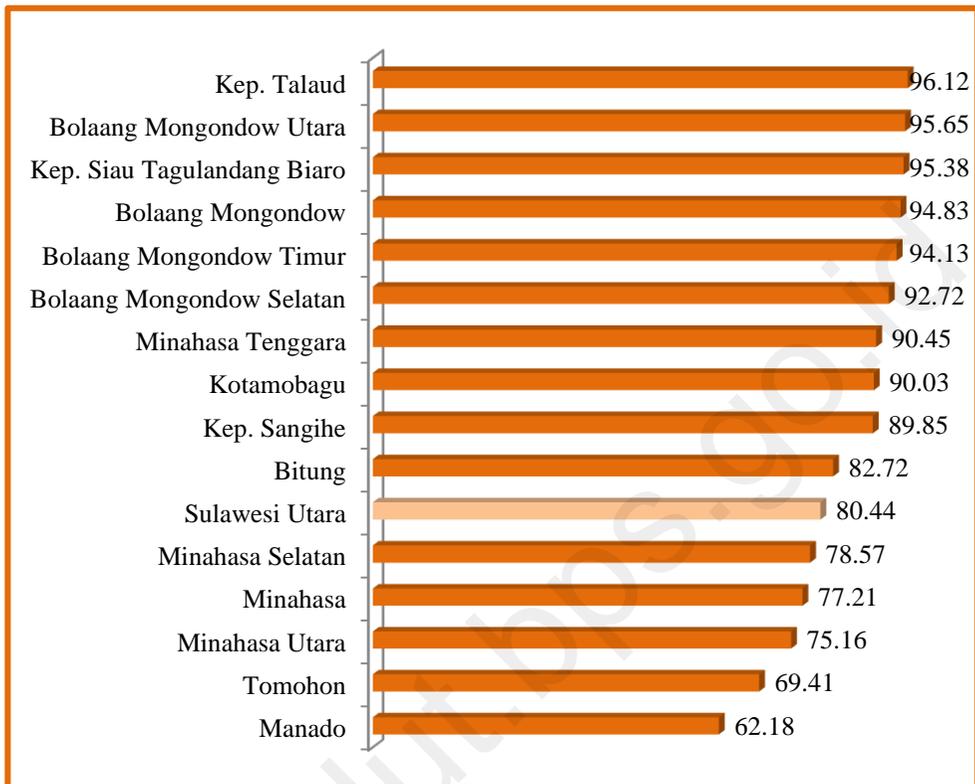
Fasilitas perumahan lainnya yang juga penting adalah penerangan. Sumber penerangan yang ideal adalah listrik (PLN dan Non PLN), karena cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Berdasarkan hasil susenas 2015, sembilan puluh sembilan persen rumah tangga di Sulawesi Utara sudah menikmati fasilitas listrik. Tidak tampak secara signifikan perbedaan rumah tangga perkotaan dan pedesaan, artinya distribusi listrik di Sulawesi Utara sudah hampir merata. Dari sudut pandang Kabupaten/Kota, masih ada 7 persen rumah tangga di Kabupaten Kepl. Sangihe yang belum mengkonsumsi listrik.

6.3. Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup disini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara atau status kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.



Gambar 6.1. Rumahtangga yang Menempati Rumah Sendiri per Kabupaten/Kota (persen), 2015



Sumber: Susenas 2015

Sekitar 80 persen rumah tangga di Sulawesi Utara menempati rumahnya sendiri. Sisanya menempati rumah kontrak, sewa, rumah dinas, rumah bebas sewa, dan lainnya. Dari gambar terlihat bahwa rumah tangga di Kota Manado yang menempati rumahnya sendiri memiliki persentase terendah dibandingkan kab/kota lainnya (62,2 persen). Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah karena lebih banyaknya pendatang di Kota Manado dibandingkan kab/kota lainnya. Kurang dari 13 persen penduduk di Kota Manado menempati rumah kontrak/sewa, sedangkan di Kepl. Talaud, Bolaang Mongondow Utara, dan Kepl. Siau Tagulandang Biaro hampir semua penduduknya menempati rumah milik sendiri.

Penduduk perdesaan lebih banyak menempati rumah milik sendiri dibandingkan dengan penduduk perkotaan. Hanya sekitar 72 persen rumah

tangga di wilayah perkotaan yang menempati rumah milik sendiri, sementara lebih dari 87 persen penduduk di pedesaan menempati rumah milik sendiri. Rumah kontrakan atau kos lebih banyak di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan. Kemungkinan lain adalah mengenai lahan di daerah perkotaan sedikit untuk membangun rumah. Kalaupun ada, harganya lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan. Sehingga penduduk yang belum memiliki rumah lebih memutuskan untuk menempati rumah kontrak, sewa, atau bebas sewa.



7. KEMISKINAN

Pembangunan pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran (BPS). Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Kemiskinan menjadi masalah utama yang terjadi di setiap negara, termasuk Indonesia.

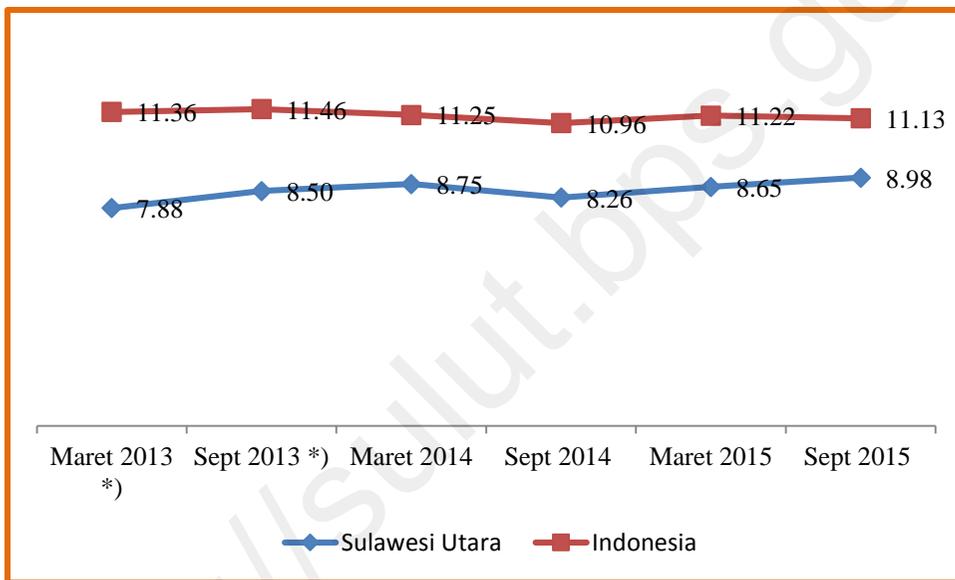
Pentingnya pemberantasan kemiskinan ditunjukkan salah satunya dengan tujuan MDGs, yang kemudian berubah menjadi SDGs mulai tahun 2016. Kemiskinan menjadi permasalahan krusial karena mempengaruhi aspek-aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, makanan, dan perumahan. Berkurangnya jumlah penduduk miskin mencerminkan bahwa secara keseluruhan pendapatan penduduk meningkat, sedangkan meningkatnya jumlah penduduk miskin mengindikasikan menurunnya pendapatan penduduk. Dengan demikian jumlah penduduk miskin merupakan indikator yang cukup baik untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat.

Aspek lain yang perlu dipantau berkenaan dengan peningkatan pendapatan penduduk tersebut adalah seberapa jauh gap atau perbedaan antara penduduk miskin dengan garis kemiskinan (P1) dan seberapa besar variasi pendapatan antar penduduk miskin (P2). Tentunya, semakin kecil indikator-indikator tersebut menandakan bahwa program pengentasan kemiskinan di suatu wilayah berhasil. Indikator distribusi pendapatan, walaupun didekati dengan pengeluaran, akan memberi petunjuk aspek pemerataan yang telah tercapai.

7.1 Perkembangan Kemiskinan

Peliknya masalah kemiskinan mendesak pemerintah untuk segera melakukan langkah-langkah nyata dalam penanggulangannya, sehingga penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas yang utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk mengurangi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru.

Gambar 7.1. Persentase Penduduk Miskin, 2013 - 2015



Sumber: Susenas 2015

Gambar di atas menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin Sulawesi Utara masih berada di bawah angka nasional. Artinya, Sulawesi Utara tidak menyumbang bertambahnya angka kemiskinan. Tentunya hal itu mengindikasikan keberhasilan pemerintah Sulawesi Utara selama 3 tahun terakhir. Hal lain yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengoreksi adalah tren kemiskinan Sulawesi Utara selama 3 tahun terakhir. Tren tersebut terlihat meningkat, dari 7,9 persen pada Maret 2013 meningkat menjadi hampir 9 persen pada September 2015.



Pada september tahun 2015, penduduk miskin Sulawesi Utara banyak yang terkonsentrasi di pedesaan. Persentase penduduk miskin di pedesaan mencapai 12 persen, sementara di perkotaan hanya 5 persen. Rendahnya angka kemiskinan di perkotaan merupakan pencapaian yang cukup baik, karena menurunkan angka kemiskinan membutuhkan upaya yang keras dari berbagai pihak.

7.2. Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂)

Membahas kemiskinan tidak hanya sekedar mengenai persentase penduduk miskin (P₀). Tetapi ada variabel lain yang juga berkaitan, yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁) menjelaskan rata-rata jarak antara taraf hidup penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Namun demikian, indeks ini tidak sensitif terhadap distribusi pendapatan di antara penduduk miskin, sehingga dibutuhkan indikator lain guna mengukur tingkat keparahan kemiskinan (P₂). Penurunan pada P₁ mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, yang mengindikasikan berkurangnya kedalaman insiden kemiskinan. Sedangkan berkurangnya penurunan pada P₂ mengindikasikan berkurangnya ketimpangan kemiskinan.



Tabel 7.1. Perkembangan Kemiskinan menurut Indikator di Sulawesi Utara, 2014 - 2015

Indikator	2014		2015	
	Maret	September	Maret	September
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,21	1,28	1,34	1,54
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,26	0,30	0,34	0,44
Garis Kemiskinan (Rp)	261.117	266.528	295.365	307.104

Sumber : Susenas

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa persoalan kemiskinan tidak hanya mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin, namun juga perlu memperhatikan jarak terhadap batas miskin (tingkat kedalaman kemiskinan) dan ketimpangan antar penduduk miskin (tingkat keparahan kemiskinan). Oleh karena itu, selain harus mampu mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan. Selama periode 2014-2015 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) mengalami kenaikan. Pergerakan Indeks kedalaman kemiskinan meningkat, hal itu mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan semakin besar. Indeks Kedalaman Kemiskinan meningkat dari 1,21 di Maret 2014 menjadi 1,54 di september 2015. Indeks Keparahan Kemiskinan yang meningkat mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin lebar. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami kenaikan dari 0,26 di Maret 2014 menjadi 0,44 di September 2014.

Indeks kedalaman daerah perkotaan (0,63) lebih kecil dibandingkan pedesaan (2,30), artinya penduduk miskin di pedesaan memiliki gap yang lebih besar dengan garis kemiskinan. Gap yang lebih besar tersebut



menyebabkan membutuhkan usaha yang lebih juga untuk memperkecil gap tersebut.

Sama halnya dengan indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan di perkotaan juga lebih kecil dibandingkan dengan angka pedesaan. Di pedesaan, pendapatan penduduk miskin lebih bervariasi. Indeks keparahan kemiskinan di wilayah perkotaan tercatat sebesar 0,13, sedangkan di wilayah pedesaan sebesar 0,71.



<http://sulut.bps.go.id>



8. SOSIAL LAINNYA

Perjalanan wisata menjadi salah satu indikator sosial yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat, gaya hidup masyarakat juga cenderung berubah dengan melakukan pemenuhan kebutuhan tersier yang salah satunya adalah berwisata. Tujuan melakukan perjalanan wisata biasanya untuk relaksasi, menikmati hari libur, menikmati pemandangan alam dan lain-lain.

Aspek sosial lain seperti akses pada teknologi informasi dan komunikasi juga dapat menjadi indikator yang dapat mengukur kesejahteraan masyarakat. Perkembangan gaya hidup modern memicu kebutuhan akan informasi dan komunikasi yang didapat melalui peralatan komunikasi seperti telepon selular pintar dan komputer. Jenis akses dan media informasi yang beragam tentunya menjadi pilihan bagi masyarakat dalam mengikuti tren gaya hidup modern. Semakin terjangkaunya harga telepon pintar dan semakin luasnya cakupan wilayah jangkauan frekuensi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data internet semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses segala informasi yang mereka inginkan.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari akses terhadap pelayanan publik seperti kredit usaha serta tingkat keamanan wilayahnya. Semakin besar masyarakat mendapatkan pelayanan kredit usaha semakin mempermudah masyarakat untuk meningkatkan aktivitas usahanya yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rasa aman dan adanya perlindungan dari negara terhadap masyarakat dari gangguan dan ancaman kejahatan diperlukan oleh masyarakat agar dapat beraktivitas dan bekerja. Semakin rendah tingkat kejahatan di suatu wilayah menjadi salah satu indikator peningkatan kesejahteraan sosial di wilayah tersebut.

8.1. Perjalanan Wisata

Perjalanan wisata yang dijadikan indikator dalam Susenas adalah perjalanan yang dilakukan penduduk dalam wilayah geografis Indonesia secara sukarela kurang dari 6 bulan dan bukan untuk tujuan memperoleh upah/gaji di tempat yang dikunjungi atau sekolah serta bersifat perjalanan bukan rutin, tujuan utama bepergiannya adalah berlibur/rekreasi.

Tabel 8.1 Penduduk per Jenis Kelamin yang Bepergian untuk Wisata menurut Kabupaten/Kota (persen), 2015

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Bolaang Mongondow	1,93	1,90	1,91
Minahasa	2,39	2,18	2,29
Kepl. Sangihe	0,89	0,82	0,86
Kepl. Talaud	0,64	0,68	0,66
Minahasa Selatan	3,96	4,53	4,23
Minahasa Utara	2,92	3,08	3,00
Bolaang Mongondow Utara	0,19	0,20	0,19
Kepl. Sitaro	1,06	1,44	1,25
Minahasa Tenggara	2,91	3,20	3,05
Bolaang Mongondow Selatan	1,47	1,76	1,61
Bolaang Mongondow Timur	1,94	2,59	2,25
Kota Manado	1,32	1,89	1,60
Kota Bitung	3,19	3,54	3,36
Kota Tomohon	2,50	3,49	2,99
Kota Kotamobagu	2,30	2,35	2,32
Sulawesi Utara	2,14	2,39	2,26

Sumber : Susenas 2015



Persentase penduduk Sulawesi Utara yang bepergian wisata pada tahun 2015 sebesar 2,3 persen . Jika dibandingkan antara persentase penduduk laki-laki dan perempuan, terdapat perbedaan yang tidak signifikan. Hal ini cukup menjadi dasar kesimpulan bahwa preferensi laki-laki dalam hal bepergian/berwisata tidak berbeda dengan perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama di kisaran 2 persen saja yang suka bepergian maupun berwisata. Perbedaan yang cukup mencolok dibanding kabupaten/kota lainnya adalah antara laki-laki dan perempuan di Minahasa Selatan. Lebih banyak perempuan di Minahasa Selatan yang suka bepergian atau berwisata dibanding laki-laki. Empat hingga lima dari 100 perempuan di Minahasa suka bepergian/berwisata. Lain halnya dengan penduduk di Bolaang Mongondow Utara, mereka dikatakan kurang melakukan kegiatan bepergian wisata karena hanya 2 dari 1000 penduduk yang melakukan bepergian wisata.

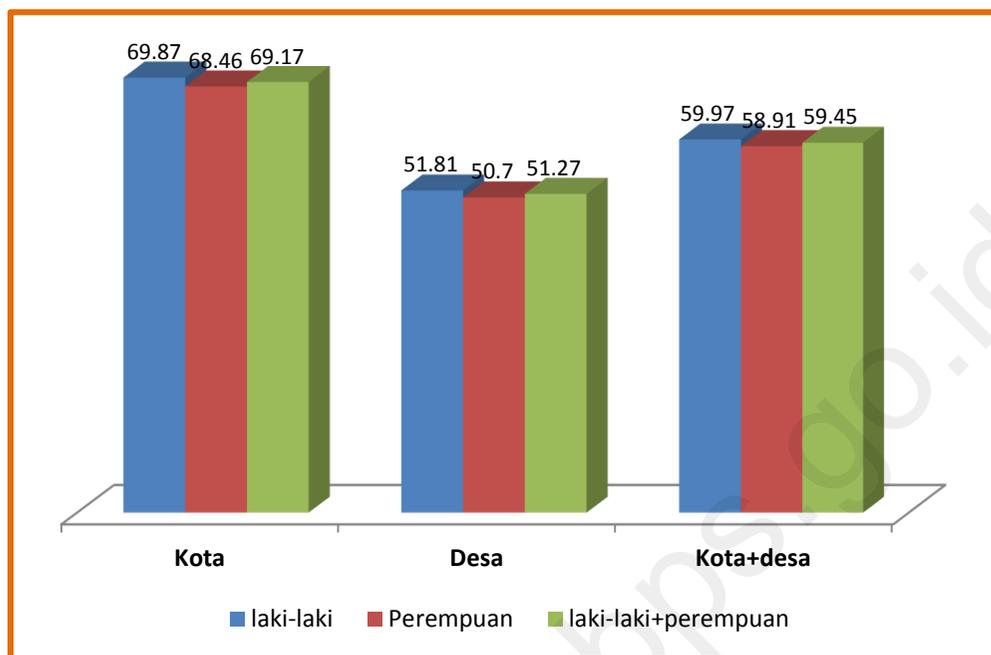
8.2. Akses pada Teknologi, Informasi, dan Komunikasi

Perkembangan telepon seluler cenderung berdampak kepada kepemilikan rumah tangga atas telepon biasa atau telepon rumah. Pesatnya perkembangan teknologi telepon seluler membuat telepon rumah semakin ditinggalkan. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya kepemilikan telepon rumah dan meningkatnya kepemilikan HP/telepon seluler. Penggunaan telepon rumah yang mengharuskan seseorang berada di posisi tertentu yang terpasang jaringan telepon semakin ditinggalkan masyarakat karena dianggap kurang efisien dalam mendukung mobilitas penggunanya.

Di daerah perkotaan, penduduk Sulawesi Utara lebih banyak yang menguasai/memiliki HP dibandingkan dengan penduduk pedesaan. Enam puluh sembilan persen penduduk perkotaan menguasai/memiliki HP sementara di pedesaan hanya sekitar 51 persen. Jika dilihat dari sisi gender, hanya sedikit perbedaan antara laki-laki dan perempuan terkait kepemilikan HP.



Gambar 8.1. Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Menguasai/Memiliki HP (persen), 2015



Sumber: Susenas 2015

Dilihat dari kabupaten/kota, Kota Manado, Bitung, dan Tomohon merupakan wilayah di Sulawesi Utara yang persentase penduduk pengguna HP paling besar. Lebih dari 74 persen penduduk Manado memiliki/menguasai HP, sementara di Kota Bitung 64 persen dan Tomohon 66 persen.

Selain kepemilikan HP, akses terhadap internet juga dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Susenas 2015 memberi gambaran bahwa 23 hingga 24 dari 100 penduduk 5 tahun ke atas Sulawesi Utara mengakses internet.

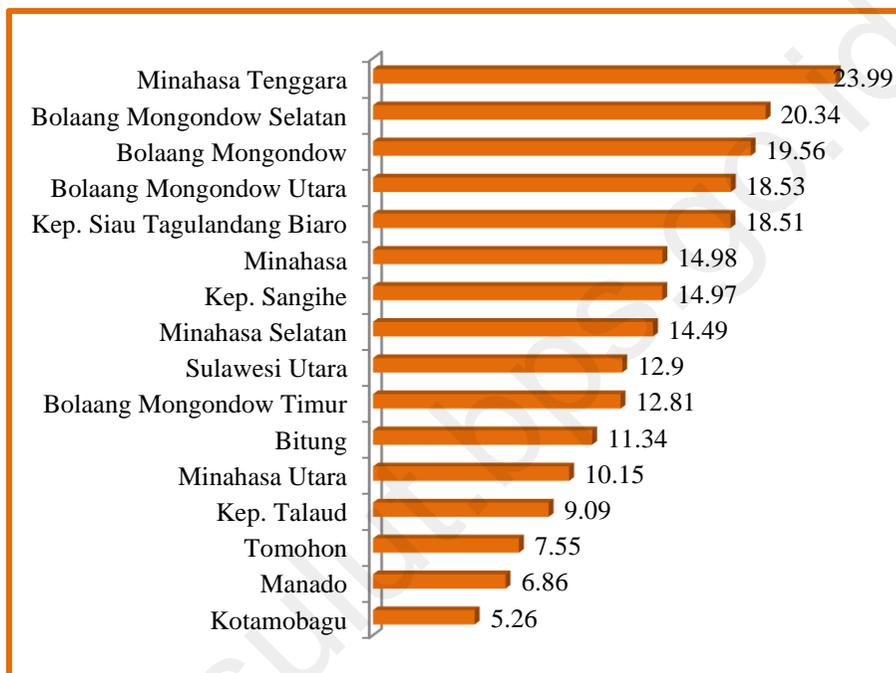
8.3. Kredit Usaha

Aliran dana ke masyarakat berupa kredit usaha yang berdampak kepada pergerakan ekonomi rakyat akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun bentuk-bentuk pelayanan pemberian



kredit usaha kepada masyarakat dapat berasal dari pemerintah, perbankan, lembaga keuangan lainnya maupun perorangan. Pemberdayaan dalam bentuk pemberian kredit usaha ini akan mendukung peningkatan pendapatan, produktifitas, dan penyediaan lapangan kerja.

Gambar 8.2. Rumah Tangga Penerima Kredit Usaha (persen), 2015



Sumber: Susenas 2015

Kredit Usaha yang dimaksud dapat berupa KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang diberikan oleh beberapa bank terpilih dan PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, Perkotaan, Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal. Jenis program penyaluran yang lain seperti KUPS (Kredit Usaha Pembibitan Sapi), KPEN-RP (Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan, dan KKPE (Kredit Ketahanan Pangan Energi). Hampir 30 persen rumah tangga penerima kredit usaha mendapatkan kredit usaha dari PNPM dan kurang dari 23 persen mendapatkan kredit usaha dari program bank selain KUR, sementara penerima KUR hampir 20 persen.

8.4. Tindak Kejahatan

Selain bantuan kredit usaha, tingkat keamanan wilayah juga dapat digunakan sebagai ukuran kesejahteraan masyarakat. Tingginya persentase korban tindak kejahatan mengindikasikan masih kurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut sehingga mendorong pelaku untuk melakukan tindak kejahatan.

Menurut data susenas 2015, ada sekitar 1 persen penduduk Sulawesi Utara yang menjadi korban kejahatan selama Maret 2014 sampai dengan Februari 2015. Rendahnya angka kriminalitas di Sulawesi Utara dimungkinkan karena telah efektifnya tim-tim khusus dari masing-masing Polres di Sulawesi Utara untuk mengatasi keluhan masyarakat terkait tindakan kriminal di lingkungan sekitar. Seperti contoh yang terkenal adalah tim Baracuda dari Polda Sulut, tim Paniki dari Polres Kota Manado, dan masih banyak yang lainnya. Pencapaian ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan mendekati nol persen, karena mempertahankan suatu prestasi lebih berat dibandingkan dengan membangun.



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI UTARA
Jl. 17 Agustus Manado 95119
Telp (0431) 847044, Faks (0431) 862204
Mailbox : sulut@bps.go.id
Website : <http://sulut.bps.go.id>